



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA



Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Délima

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, bimbingan, dan karunia-Nya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menyelesaikan program dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan ini merupakan hasil capaian target dan realisasi pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan ini juga merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Sekretariat Deputi dan 5 Asisten Deputi, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan masukkan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2022
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif,



Odo R.M. Manuhutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
BAB II.....	6
RENCANA KINERJA.....	6
2.1 Sasaran Strategis.....	6
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	8
2.3 Penghitungan Capaian Kinerja	10
2.3 Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	11
BAB III.....	13
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.2 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	3
Gambar 2. Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7
Gambar 3. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Per November 2021	14
Gambar 4. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Indonesia.....	15
Gambar 5. Penyelenggaraan WSBK 2021	21
Gambar 6. Skenario Kedatangan Wisatawan Mancanegara pada 2021.....	22
Gambar 7. Skema Strategi Pengendalian Covid-19 di Indonesia.....	22
Gambar 8. Skema Proses Kedatangan Wisman	23
Gambar 9. Kerangka Pemulihan Ekonomi Menuju Bali Yang Berkelanjutan	24
Gambar 10. Total Onboarding Gernas BBI.....	26
Gambar 11. Data Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.....	32
Gambar 12. Kegiatan Indonesia Geopark Summit 2021	33
Gambar 13. Creative Hub Di DPSP Labuan Bajo	34
Gambar 14. Creative Hub Di DPSP Borobudur.....	34
Gambar 15. realisasi penanaman modal pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36
Gambar 16. Pemetaan Indikatif Rencana Investasi Swasta pada Destinasi Pariwisata Prioritas Untuk Tahun 2022	40
Gambar 17. Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI.....	41
Gambar 18. Data Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.....	43
Gambar 19. Modul Pelatihan CPNS Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021	44
Gambar 20. Kegiatan Penyusunan SKP, Bandung 20-22 Desember 2021	44
Gambar 21. Grafik Nilai Assesment Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	45
Gambar 22. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	47
Gambar 23. Hasil Penilaian IKPA Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	48
Gambar 24. Grafik Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	49
Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	49
Gambar 26. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	50
Gambar 27. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif .	51

Gambar 28. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51
Gambar 29. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52
Gambar 30. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021.....	8
Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021	10
Tabel 3. Total Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2021	12
Tabel 4. Nilai Assesment Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	45
Tabel 5. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	46
Tabel 6. Realisasi Anggaran Esselon II Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Per 31 Desember 2021	48
Tabel 7. Capain Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Aplikasi SIK-M	56
Tabel 8. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2021.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri Sekretariat Deputy dan 5 Asisten Deputy, yaitu; Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputy Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam mencapai tujuannya, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator kinerja (IK).

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan capaian kinerja atas target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.2 Tugas dan Fungsi

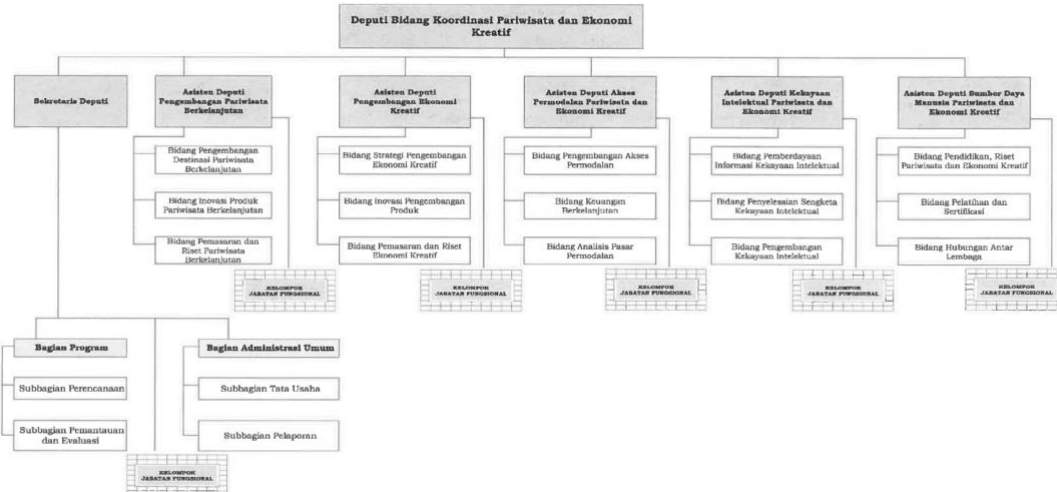
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi;
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran dan capaian kinerja;
 - c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
 - d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
 - e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
 - f. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

- **Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan** mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.
- **Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.
- **Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang akses permodalan pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan.

- **Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual.

- **Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas untuk Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

BAB II RENCANA KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
2. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
3. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif
4. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara mencapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut digambarkan dalam bentuk peta strategis. Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*) menggambarkan pencapaian tujuan;
2. perspektif pengguna (*customer perspective*) menggambarkan pencapaian sasaran strategis
3. perspektif proses bisnis internal (*internal bussines process perspective*) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan
4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.



Gambar 2. Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 (tiga) sasaran strategis utama yakni: 1) Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional, 2) Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional; 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun seluruh sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 terdapat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Program	
Stakeholder Perspective	
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional
SS2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional
SS3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Costumer Perspective	
SS4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
SS5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
SS6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif

SS7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
SS8	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
Internal Business Perspective	
SS9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien
Learn and Growth Perspective	
SS10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS11	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SS12	Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 15 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan
Stakeholder Perspective			
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%
SS2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional	Jumlah tata Kelola Destinasi	5

SS3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih	50.000
Customer Perspective			
SS4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5
SS5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi
SS6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.17 Triliun
SS7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftar Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa
SS8	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih	50.000 Orang
Internal Business Perspective			
SS9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%
		Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan	50%
Learn and Growth Perspective			
SS10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Deputi yang sesuai Kompetensinya	75%
SS11	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi SAKIP Deputi	65
		Nilai PMPRB Deputi	60
SS12	Terlaksananya administrasi keuangan	Nilai IKPA Deputi Bidang Pariwisata	65

	yang akuntabel di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	dan Ekonomi Kreatif	
--	--	---------------------	--

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

2.3 Penghitungan Capaian Kinerja

1. **IKU 1. Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** diukur berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. **IKU 2. Persentase Kontribusi PDB Pariwisata** diukur berdasarkan kontribusi setiap sektor pada PDB Indonesia. Data diambil dari laporan triwulanan perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
3. **IKU 3. Jumlah tata Kelola Destinasi** diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pada pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
4. **IKU 4. Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih** diukur berdasarkan jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
5. **IKU 5. Jumlah Tata Kelola Pariwisata** diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pada destinasi pariwisata dan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
6. **IKU 6. Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif** diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pembangunan *creative hub* yang menjadi pusat ekonomi kreatif di setiap DPSP.
7. **IKU 7. Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** diukur berdasarkan penanaman modal asing dan dalam negeri pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diambil dari BPS.
8. **IKU 8. Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftarkan Kekayaan Intelektual** diukur berdasarkan jumlah produk dan jasa yang bergerak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah mendapatkan fasilitasi kekayaan intelektual.
9. **IKU 9. Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih** diukur berdasarkan jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
10. **IKU 10. Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan** diukur berdasarkan jumlah rencana rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti untuk diterbitkan.
11. **IKU 11. Persentase Rancangan Kebijakan yang Dilaksanakan** diukur berdasarkan jumlah rencana rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti untuk diimplementasikan,
12. **IKU 12. Presentase SDM Deputi yang sesuai Kompetensinya** diukur berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi

Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kompetensi yang dimaksud adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki

- 13. IKU 13. Nilai Evaluasi SAKIP Deputy** diukur berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 14. IKU 14. Nilai PMPRB Deputy** diukur berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.
- 15. IKU 15. Nilai IKPA Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** diukur berdasarkan penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

2.3 Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp. 14.300.000.000.

Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan melalui Nota Dinas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 426/Marves/Sesmenko/ND/2021, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan refocussing anggaran dengan total Rp. 2.700.000.000 pada program kebijakan.

Kemudian melanjutkan refocussing anggaran tersebut, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: 481/Marves/Sesmenko/ND/2021 perihal Optimalisasi Anggaran Kemenko Marves TA 2021, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 untuk kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tambahan anggaran tersebut dimasukkan pada Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, sehingga rincian pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Unit	Pagu
1	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 3.298.650.000
2	Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Rp 1.861.350.000
3	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 4.085.000.000
4	Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.485.000.000
5	Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.285.000.000
6	Asisten Deputy Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.485.000.000
Total Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2021		Rp 13.500.000.000

Tabel 3. Total Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2021. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan hasil perbandingan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk persentase. Target capaian kinerja merupakan satuan yang dijadikan target dari Indikator Kinerja (IK). Sementara itu, Indikator Kinerja (IK) merupakan ukuran untuk menggambarkan tujuan utama dari Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- **SS 1. Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Nasional**

Sasaran strategis meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional terdiri dari 2 Indikator Kerja Utama yaitu Nilai Devisa Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Persentase kontribusi PDB Pariwisata.

Pada 2020, berdasarkan data Kementerian Perdagangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah berkontribusi sebanyak USD 86,4 miliar terhadap penambahan nilai devisa negara. Sementara itu, berdasarkan data BPS persentase kontribusi PDB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar 2,55%.

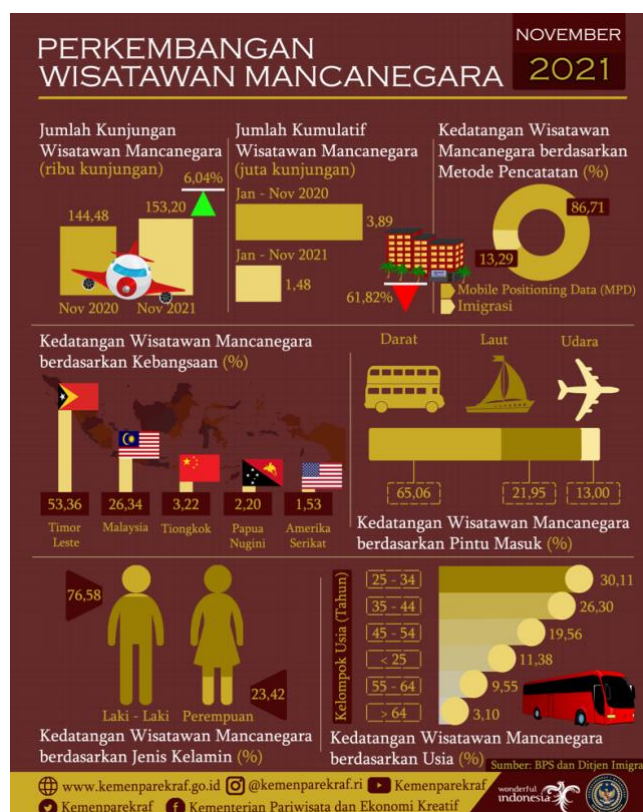
Pada 2021, mengacu pada data yang sama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah berkontribusi sebanyak USD 22,25 Miliar terhadap penambahan nilai devisa negara. Sementara itu, persentase kontribusi PDB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar 2,26%.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada November 2021 terjadi penurunan sebesar 61,82% kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia. Pada periode Januari-November 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 3,89 juta orang. Sementara itu, pada periode Januari-November 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 1,48 juta orang.

Tentu saja hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 diseluruh dunia. Oleh karena itu, sebagai bentuk adaptasi di masa pandemi seperti ini kunci agar sektor ini tetap bisa berjalan adalah dengan cara penerapan penggunaan protokol CHSE di setiap destinasi wisata. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *cleanliness, health, safety dan environment sustainability*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga yang menaungi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tanggung jawab agar sektor ini tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti ini, dan menghadirkan program protokol ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat melalui protokol Kesehatan yang disiplin.

Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE.



Gambar 3. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Per November 2021

Sementara itu, berdasarkan data BPS Persentase kontribusi PDB Pariwisata sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 3,89%. Persentase ini diambil hanya dari kontribusi PDB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c)				
	2021				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.44	1.87	1.72	1.84	1.84
B. Pertambangan dan Penggalian	-2.02	1.53	3.61	4.00	4.00
C. Industri Pengolahan	-1.38	2.46	2.87	3.39	3.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.68	5.23	4.76	5.55	5.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.46	5.62	5.26	4.97	4.97
F. Konstruksi	-0.79	1.72	2.43	2.81	2.81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.26	3.94	4.35	4.65	4.65
H. Transportasi dan Pergudangan	-13.09	2.75	1.57	3.24	3.24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.27	5.35	3.51	3.89	3.89
J. Informasi dan Komunikasi	8.72	7.79	7.02	6.81	6.81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2.97	2.37	3.00	1.56	1.56
L. Real Estate	0.94	1.88	2.40	2.78	2.78
M,N. Jasa Perusahaan	-6.10	1.31	0.68	0.73	0.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.26	3.77	-0.81	-0.33	-0.33
P. Jasa Pendidikan	-1.54	2.16	-0.11	0.11	0.11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.39	7.45	9.81	10.46	10.46
R,S,T,U. Jasa lainnya	-5.15	2.71	1.69	2.12	2.12
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-0.95	2.95	2.97	3.27	3.27
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	6.78	7.51	10.98	14.85	14.85
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	-0.70	3.10	3.24	3.69	3.69

Gambar 4. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Indonesia

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan beberapa kegiatan dan program kerja antara lain:

i. Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Sepanjang 2021, telah dilaksanakan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga/pemda terkait penyelesaian 101 isu, serta 14 isu tambahan, pada 5 DPSP. Dalam perkembangannya, sebanyak 14% isu telah selesai, 74% isu sedang berjalan, dan 12% isu tertahan. Secara umum, faktor utama penyebab tertundanya penyelesaian isu dimaksud adalah (i) pembebasan lahan, dan (ii) refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Instansi/badan pengelola 5 DPSP telah melaporkan beberapa progres terkait pengembangan lahan otoritatif, realisasi investasi, quick wins tahun 2022 dan calendar of events tahun 2022. Berdasarkan laporan tersebut, secara umum terdapat tiga hambatan dalam pengembangan kawasan otoritatif dan koordinatif, antara lain (i) payung hukum, (ii) peran dan komitmen pemda serta K/L, dan (iii) rendahnya minat investor.

Pada 2022, secara umum pengembangan 5 DPSP akan berfokus pada penyelesaian isu-isu kritis dan strategis sebagaimana lampiran III. Pengembangan 5 DPSP akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat setempat, dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Hingga saat ini, payung hukum tentang 5 DPSP belum tersedia. Ketentuan payung hukum yang sudah dibentuk hanya membahas mengenai Badan Pelaksana Kawasan, namun belum merepresentasikan kawasan koordinatif dan otoritatif. Ke depannya, diperlukan penjelasan mendetail terkait definisi, deliniasi, dan jangka waktu pembangunan 5 DPSP guna menjamin keberlanjutan pengembangan kawasan.

Selain itu, ketentuan khusus mengenai insentif fiskal dan non fiskal di 5 DPSP masih belum tersedia. Hal tersebut berimplikasi pada kurangnya minat investor untuk ikut serta dalam program pengembangan 5 DPSP. Kemeninves/BKPM merencanakan kegiatan forum bisnis promosi investasi daerah pada tahun 2022. Adapun target partisipan pada forum tersebut adalah para Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) eksisting, calon investor, K/L terkait, asosiasi dan UMKM, DPMPTSP seluruh Indonesia, dan perwakilan Kedutaan Besar. Program tersebut akan dilaksanakan di 5 DPSP, bekerja sama dengan Pemda dan Badan Pelaksana Otorita.

Pada 2021, KemenPUPR telah mengerjakan 140 paket pembangunan aset KSPN senilai Rp 3,9 triliun yang tersebar di 5 DPSP. Aset-aset KSPN yang telah dibangun di 5 DPSP memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga perlu dirawat dan dikelola secara optimal. Lebih lanjut, dibutuhkan mekanisme pengelolaan aset yang profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif pada peningkatan nilai perekonomian daerah dan masyarakat sekitar.

Kemenparekraf telah melakukan pemetaan isu strategis terkait

pengembangan SDM parekraf, yakni (i) pelatihan bagi SDM parekraf berdasarkan SKKNI melalui sertifikat kompetensi, (ii) penguatan value chain UMKM parekraf melalui wirausaha, (iii) pemulihan sektor parekraf melalui pembukaan peluang kerja bagi SDM parekraf, (iv) pengembangan desa wisata sebagai alternatif destinasi pariwisata, dan (v) kolaborasi dan implementasi program pengembangan sektor parekraf pada level nasional dan internasional. Untuk itu, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran sebesar Rp 145 miliar untuk pengembangan SDM Parekraf di tahun 2022.

Kemendesa PDTT telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pengurus BUMDes di beberapa daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Modul dan sertifikasi bimtek perlu disepakati antar K/L dan dikeluarkan secara satu pintu dengan mengacu pada SKKNI. Selain itu, modul pelatihan dimaksud juga perlu disinergikan dengan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP.

Pengembangan sektor parekraf di 5 DPSP pada 2022 akan lebih memperhatikan konsep pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan guna mendukung Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada 2060. Hal tersebut akan diterapkan melalui penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular.

Beberapa program ekonomi biru, hijau, dan sirkular yang akan didorong di 5 DPSP pada 2022 antara lain: (i) penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), (ii) penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), (iii) penerapan instrumen jasa lingkungan, (iv) pengelolaan sampah berkelanjutan, dan (v) peningkatan investasi ecotourism dan energi ramah lingkungan. Hal tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektoral, utamanya melibatkan KemenESDM, KKP, KLHK, dan Pemda.

Aplikasi monitoring pembangunan 5 DPSP berbasis Geographic Information System (GIS) telah diluncurkan oleh PT Telkom Indonesia, bekerja sama dengan tiga Badan Otorita Pariwisata dan K/L terkait. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan monitoring progres pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai K/L dan Pemda di 5 DPSP. Namun, saat ini data dari beberapa K/L belum lengkap, sehingga diperlukan kerja sama dari K/L terkait untuk pemutakhiran data di aplikasi GIS;

Kemenhub telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan aksesibilitas di 5 DPSP. Beberapa pengembangan

dan pembangunan yang akan dilanjutkan pada 2022 yaitu (i) lelang naming rights 13 pelabuhan di Danau Toba, (ii) optimalisasi transportasi publik ke Borobudur, (iii) pembangunan dermaga kapal cepat dari Bali ke Mandalika, dan (iv) pembangunan tempat pemberhentian di antara jalan dari Manado ke Likupang.

Kemenkes terus melakukan percepatan vaksinasi dengan target 70% penduduk Indonesia tervaksinasi pada Desember 2021. Saat ini, jumlah penduduk tervaksinasi di Sumatera Utara dan NTT masih belum memenuhi target. Penguatan infrastruktur surveilans untuk testing dan tracing di 5 DPSP masih diperlukan, terutama di Manggarai Barat dan Lombok Tengah. Selain itu, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kelas rumah sakit di 5 DPSP menjadi tipe A pada 2022.

Kemeninves/BKPM telah melakukan Feasibility Study (FS) investasi di DPSP Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Sementara itu, FS di Danau Toba akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. FS memuat status tanah, status kerja sama, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh calon investor. Investor potensial bagi proyek 5 DPSP adalah Australia, China, dan Singapura.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, diperlukan pembangunan infrastruktur non fisik, meliputi penyiapan SDM untuk menjadi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, penataan ruang yang berkelanjutan, penghijauan lahan, dan penelitian lingkungan seperti terumbu karang dan komodo yang intensif untuk menjaga kelestarian alam.

Berdasarkan data Pemprov Sulawesi Utara, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 10% terhadap PDB Sulawesi Utara. Selama November 2021, Sulawesi Utara telah menerima kunjungan wisman dari RRT sebanyak 300 orang. Pengembangan Sulawesi Utara mengalami hambatan karena sebagian wilayah pengembangan masuk ke dalam kawasan konservasi. Lebih lanjut, Pemprov telah melakukan kerja sama dengan universitas di Manado terkait studi mengenai pengembangan wisata.

Holding BUMN pariwisata yang sudah terbentuk pada Oktober 2021 akan berfokus pada pengembangan Danau Toba sebagai lakeside and geopark tourism, Borobudur sebagai culture and heritage tourism, Mandalika sebagai youth and sport tourism, Labuan Bajo sebagai ecotourism destination, dan Likupang sebagai eco

resort and luxury destination.

Tiga fokus utama pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang akan dilaksanakan oleh BUMN, yaitu pada sektor (i) pendidikan, (ii) lingkungan hidup, dan (iii) pelatihan dan pengembangan UMKM.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016 dan berkomitmen untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional dan 29% dengan usaha sendiri guna mencapai net zero emission pada 2060. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk menerapkan prinsip ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi biru, hijau dan sirkular. Ke depannya, Indonesia akan menjadi negara penerima manfaat dari pergeseran paradigma ekonomi dunia melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Saat ini, beberapa negara telah menerapkan instrumen lingkungan hidup pada sektor pariwisata. Konsep serupa juga mulai diaplikasikan di Indonesia salah satunya telah diterapkan di Kepulauan Mentawai. Diperlukan langkah strategis dengan menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi melalui pengembangan konsep instrumen ekonomi lingkungan hidup pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

ii. **Pelaksanaan WSBK dan Persiapan MotoGP 2022**

Superbike World Championship 2021 (WSBK 2021) sukses digelar. Ajang balap motor internasional ini terlaksana selama tiga hari dari tanggal 19 hingga 21 November 2021 di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ketiga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Kepala Kepolisian Daerah NTB M. Iqbal beserta jajarannya menghadiri rangkaian terakhir sekaligus penutup dari WSBK 2021.

Ajang WSBK 2021 telah memberikan dampak perekonomian yang sangat signifikan. Gubernur NTB melaporkan bahwa tidak ada satupun hotel dan homestay yang kosong dan harganya naik tiga kali lipat, sewa mobil naik, semua ekonomi menjadi hidup. WSBK 2021 sukses mendatangkan ribuan penonton dari berbagai belahan dunia ke Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Akan tetapi, tentunya hal ini turut menjadikan aspek seperti protokol kesehatan, keamanan dan

ketertiban menjadi prioritas, terutama agar tidak terjadi kluster-kluster Covid-19 baru pasca-WSBK 2021.

ITDC menyiapkan regulasi proses yang ketat antara lain penonton harus sudah vaksin dua kali, memiliki hasil swab antigen (1x24 jam) atau PCR (2x24jam) negatif COVID-19 yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, serta menggunakan masker double selama menonton event. Selain itu, sebagai tindakan preventif, ITDC juga menyediakan sarana prasarana fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, tenda medis, mini klinik, ambulans, medical center, dan juga tenaga kesehatan terlatih di area sirkuit.

Dalam mendukung keselamatan selama event WSBK berlangsung, Basarnas mengerahkan 25 personil, Helikopter HR-3603, kendaraan operasional, dan peralatan SAR lainnya. Disamping itu, Basarnas membentuk dua posko yang berlokasi di Pos Unit Siaga Kuta Mandalika (Gedung Balawista) dan di Pantai Seger.

Kementerian Perhubungan juga turut mendukung kelancaran penyelenggaraan acara WSBK 2021. Salah satunya yaitu mempersiapkan manajemen rekayasa lalu lintas, agar mobilitas pergerakan orang dan kendaraan pada saat event berlangsung dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, tertib dan sehat, dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat.

Sejumlah sarana transportasi juga disiapkan untuk melancarkan konektivitas dari dan menuju Mandalika, yaitu: penyediaan transportasi massal bus untuk menghubungkan antara Mandalika, dengan bandara Lombok, dan sejumlah Pelabuhan yakni: Gilimas, Kayangan, Bangka, dan Mataram, melalui skema Buy The Service (BTS). Kemudian, menyiapkan kapal cepat untuk melancarkan konektivitas antara Lombok dengan daerah sekitar seperti: Padang Bai, Lembar, Sumbawa, dan Bali.

Selain melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, sejumlah hal lainnya yang telah disiapkan Kemenhub diantaranya yaitu: meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pembangunan Pelabuhan Laut Gilimas, pemberian subsidi operasional angkutan antar moda dari dan ke kawasan wisata Mandalika, pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda, pembangunan fasilitas perlengkapan jalan, dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dari dan ke Pulau Lombok.

Kementerian Kesehatan mendukung dan memfasilitasi dalam hal pengawasan teknis medis termasuk penegakan protokol kesehatan, penyediaan pelayanan medis, penyiapan tim kesehatan, fasilitas rumah sakit serta pengelolaan makanan dan limbah medis dalam ajang ini. Sistem bubble diterapkan selama event berlangsung untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. seluruh partisipan yang memasuki KEK melakukan scan barcode menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Selain untuk memastikan keamanan bagi seluruh peserta dan 25% kapasitas penonton, juga untuk memudahkan dan mempercepat tim kesehatan melakukan tracking dan tracing apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kegiatan WSBK, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 185 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan World Superbike Tahun 2021 dan MotoGP Tahun 2022. Bapak Hadi Tjahjanto bersama Kemenparekraf akan membantu persiapan pelaksanaan MotoGP 2022.

Penyelenggaraan WSBK melibatkan 1.475 tenaga kerja lokal dan 330 UMKM. Pelibatan tenaga kerja dan UMKM lokal memastikan bahwa manfaat dari penyelenggaraan event WSBK berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

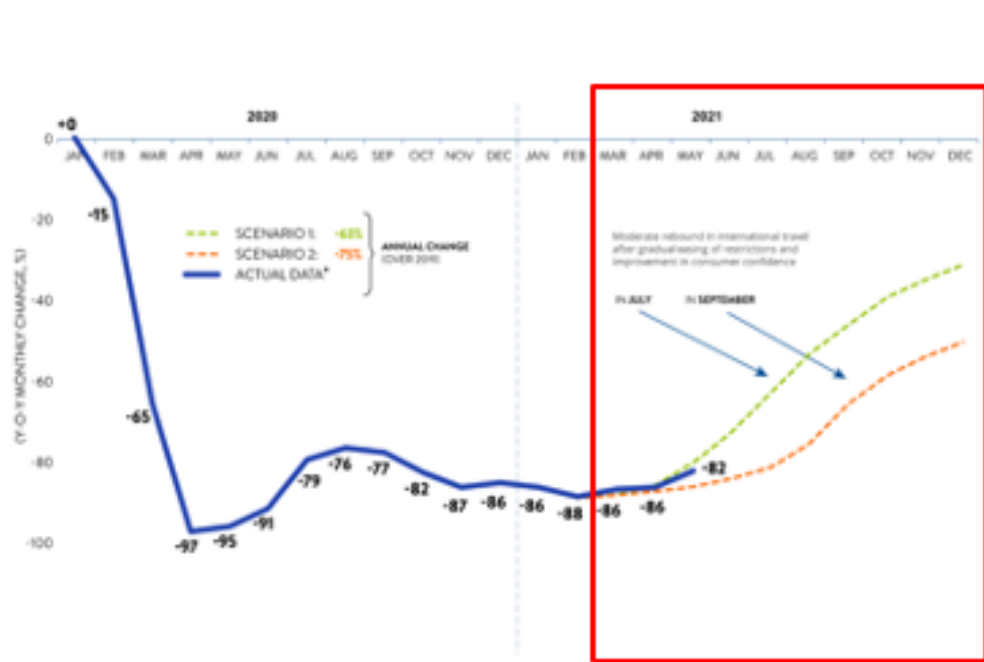
Lebih lanjut, persiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 akan berfokus pada penyelesaian sembilan isu utama yaitu struktur organisasi, infrastruktur, penataan kawasan, penyelesaian permasalahan lahan, kesiapan moda transportasi, akomodasi, promosi produk lokal, protokol kesehatan, dan risk management.



Gambar 5. Penyelenggaraan WSBK 2021

iii. **Pemulihan Bali sebagai Destinasi Pariwisata Berkualitas**

Kelonggaran terhadap pembatasan wisata dan peningkatan kepercayaan wisatawan mampu meningkatkan kunjungan wisman ke destinasi wisata. Hal tersebut telah terjadi sejak September 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi pariwisata dunia diperkirakan akan kembali semula seperti sebelum 2020 hingga 2024.



Gambar 6. Skenario Kedatangan Wisatawan Mancanegara pada 2021

Tingginya tingkat vaksinasi yang telah dicapai oleh Provinsi Bali berimplikasi pada kesiapan pembukaan koridor Bali terhadap wisman. Persiapan pembukaan pariwisata di Bali harus diawali dengan penekanan laju transmisi lokal seminimal mungkin melalui: (a) vaksinasi; (b) kepatuhan 3M; dan (c) 3T dan isoter.

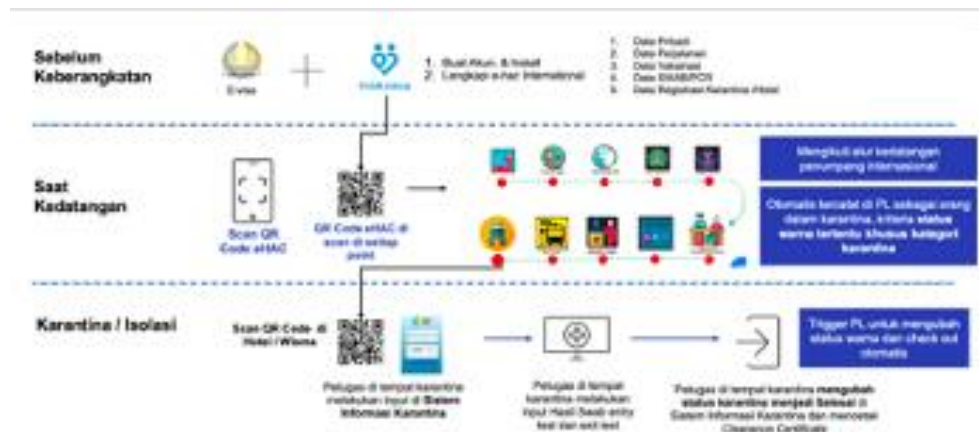


Gambar 7. Skema Strategi Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Permasalahan utama adalah dibutuhkannya persiapan matang dalam pembukaan Bali dengan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Tujuan utama adalah pemulihan perekonomian Bali melalui (a) penerapan pariwisata berkualitas dan (b) transformasi ekonomi.

Penerapan Bali sebagai destinasi berkualitas dilakukan melalui upaya (a) akselerasi sertifikasi CHSE mandiri bagi fasilitas pariwisata, (b) persiapan pembukaan pariwisata secara bertahap dengan menekan laju transmisi lokal, (c) penggunaan PeduliLindungi, dan (d) pemberlakuan karantina.

Sebanyak 2.853 usaha telah mendaftar dan melaksanakan protokol CHSE di Provinsi Bali. Peluncuran skema akreditasi dan sertifikasi CHSE mandiri (SNI CHSE) ditargetkan akan dilaksanakan pada minggu ketiga November 2021. Sertifikat CHSE mandiri diberikan sebagai bentuk positive reinforcement bagi sektor usaha yang menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengandung unsur punishment bagi usaha yang tidak mendapatkan sertifikasi CHSE tersebut.



Gambar 8. Skema Proses Kedatangan Wisman

Telah ditentukan 19 negara yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Bali dan Kepri sesuai SK Satgas Covid-19 No.15 Tahun 2021 tentang 19 Negara Asing Warga Negeranya Diizinkan Datang Ke Indonesia. Wisman wajib menggunakan PeduliLindungi dan wajib tes PCR di lab negara asal. Data esensial, bukti vaksinasi telah terintegrasi, sementara itu e-Visa, dan asuransi dalam proses integrasi dengan PeduliLindungi.

Wisman yang datang ke Bali wajib melalui masa karantina selama 5 hari. Wisman yang masuk tidak diperbolehkan keluar dari kamar/private villa/kapal (live on board).

Sementara itu, atas hasil Rakor Menko Marves pada 16 Juni 2021, Bappenas, Bank Indonesia, dan Pemda Bali menyusun Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali dan Master Plan Kawasan Pariwisata Uluapan (Ubud, Tegallalang dan Payangan) yang akan diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 3 Desember 2021.

Rancangan induk ini menjadi tonggak transformasi perekonomian Bali dengan dua pilar utama, yakni perubahan pariwisata massal menjadi pariwisata berkualitas dan transformasi struktural yang juga bertumpu pada industri pertanian, perikanan, ekonomi digital dan ekonomi kreatif, serta pendidikan tinggi. Hasil riset terkait fokus sektor prioritas transformasi perekonomian Bali akan disertakan dalam dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan menjadi PSN (Proyek Strategis Nasional).



Gambar 9. Kerangka Pemulihan Ekonomi Menuju Bali Yang Berkelanjutan

iv. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Kemenko Marves melaksanakan koordinasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), ecommerce, PJSP, dan Top Brand sebagai bagian dari Tim Gernas BBI bertempat di Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan pemerintah bagi peningkatan kemampuan daya saing para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) terutama di platform digital.

Kemenko Marves diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Odo RM. Manuhutu menyebutkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, akan tetapi permasalahan yang ada harus dianggap sebagai fondasi yang memperkuat Gernas BBI. Untuk terus berupaya dalam mendefinisikan permasalahan mulai dari pengembangan produk, kualitas, sampai dengan kuantitas sehingga dapat merangkum permasalahan yang ada, dan dari rangkuman itu akan kita bentuk sebagai fondasi untuk memperkuat kegiatan Gernas BBI ini.

Berdasarkan Keputusan Presiden 15/2021 pada pasal 3 Tim Gernas BBI 2022 berfokus pada Peningkatan UMKM/IKM/Artisan ke ekosistem digital; Peningkatan transaksi penjualan; dan Pendampingan dalam memulai dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Selain itu, tim juga akan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan target BBI 2022 dengan memberikan apresiasi bagi UMKM unggul dengan konsep panen setelah pendampingan selama 3 bulan. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diselenggarakan oleh K/L serta evaluasi capaian penjualan sehingga menjadi pembelajaran serta motivasi bagi UMKM/IKM/Artisan lainnya. Diharapkan dengan fokus yang sudah kita sepakati nantinya akan membuat Gernas BBI lebih komprehensif pada tahun 2022.

Kepada para peserta Rakor, bahwa pada kesempatan kali ini sudah nampak saling kerja sama antar K/L. Tapi harus bertekad bersama-sama untuk mempertajam lagi tujuan BBI ini sehingga tahun 2022 dapat memperoleh hasil lebih baik dari yang sekarang. Kemudian, pembahasan berlanjut pada pusat-pusat pelatihan. Harapannya dari K/L ataupun platform-platform e-commerce dapat menyediakan pusat pelatihan di kota-kota besar dengan tetap memperhatikan pendampingan pada UMKM dan pelatihan tersebut harus terbuka untuk UMKM daerah tersebut.

Pada intinya, Gernas BBI dibentuk bukan hanya memperhatikan dari sisi kuantitas penjualan sampai dengan pembelian saja, tetapi kita juga harus tetap mendampingi para pelaku UMKM, dan harus memudahkan UMKM untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Terjadinya Pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu telah mengubah perilaku masyarakat, khususnya pada pelaku bisnis, usaha pariwisata, dan pelaku UMKM/IKM/Artisan yang berjualan secara

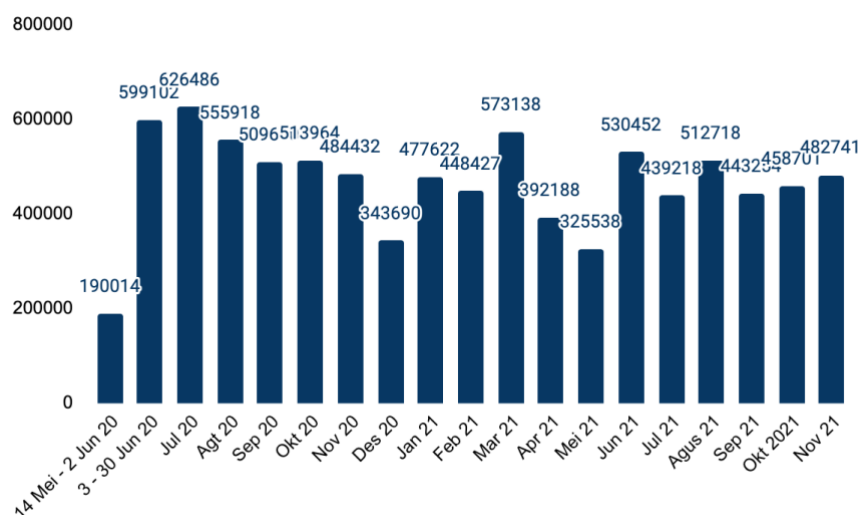
offline (luring).

Untuk membantu UMKM/IKM/Artisan bangkit di tengah pandemi, pemerintah meluncurkan Gernas BBI pada 14 Mei 2020. Gerakan ini didukung oleh berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat/daerah, perbankan, pelaku usaha, media, top brand, asosiasi dan e-commerce.

Sejak Mei 2020 hingga November 2021, jumlah UMKM/IKM/Artisan onboarding BBI mencapai 8.9 juta unit atau mengalami peningkatan sebesar 111% sejak diluncurkan, sehingga total menjadi 16.9 juta unit.

Berdasarkan Pasal 3 Keppres 15/2021, Tim Gernas BBI 2022 berfokus pada (1) peningkatan UMKM/IKM/Artisan ke ekosistem digital, (2) peningkatan transaksi penjualan, dan (3) pendampingan dalam memulai dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Maka dari itu, selain target onboarding, Gernas BBI juga akan mendorong pendampingan berkelanjutan bagi UMKM. Salah satunya melalui monitoring yang akan dilakukan selama program berlangsung dengan konsep harvesting/panen UMKM per 3 bulan. Laporan penjualan akan menjadi learning lesson untuk UMKM/IKM/Artisan lain dan menjadi prioritas pembinaan selanjutnya. Gernas BBI juga akan berfokus pada penerapan karakter BBI sejak usia dini.



Gambar 10. Total Onboarding Gernas BBI

- **SS 2. Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional**

Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional sesuai target

mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Untuk target dalam capaian kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 5 (lima), diantaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, dan Likupang yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas.

Dalam tata Kelola destinasi wisata tidak terlepas dari 3A yaitu Amenity, Accessibility dan Attraction. 3A dibutuhkan agar terciptanya pengelolaan wisata yang optimal sesuai dengan proses pengelolaan pariwisata. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, sedangkan Amenitas adalah fasilitas pendukung dari sebuah destinasi wisata dan Atraksi dalam pariwisata merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata.

Sepanjang 2021, telah dilaksanakan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga/pemda terkait penyelesaian 101 isu, serta 14 isu tambahan, pada 5 DPSP. Dalam perkembangannya, sebanyak 14% isu telah selesai, 74% isu sedang berjalan, dan 12% isu tertahan. Secara umum, faktor utama penyebab tertundanya penyelesaian isu dimaksud adalah (i) pembebasan lahan, dan (ii) refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Instansi/badan pengelola 5 DPSP telah melaporkan beberapa progres terkait pengembangan lahan otoritatif, realisasi investasi, quick wins tahun 2022 dan calendar of events tahun 2022. Berdasarkan laporan tersebut, secara umum terdapat tiga hambatan dalam pengembangan kawasan otoritatif dan koordinatif, antara lain (i) payung hukum, (ii) peran dan komitmen pemda serta K/L, dan (iii) rendahnya minat investor.

Pada 2022, secara umum pengembangan 5 DPSP akan berfokus pada penyelesaian isu-isu kritis dan strategis sebagaimana lampiran III. Pengembangan 5 DPSP akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat setempat, dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Hingga saat ini, payung hukum tentang 5 DPSP belum tersedia. Ketentuan payung hukum yang sudah dibentuk hanya membahas mengenai Badan Pelaksana Kawasan, namun belum merepresentasikan kawasan koordinatif dan otoritatif. Ke depannya, diperlukan penjelasan mendetail terkait definisi, deliniasi, dan jangka waktu pembangunan 5 DPSP guna menjamin keberlanjutan pengembangan kawasan.

Selain itu, ketentuan khusus mengenai insentif fiskal dan non fiskal di 5 DPSP masih belum tersedia. Hal tersebut berimplikasi pada kurangnya

minat investor untuk ikut serta dalam program pengembangan 5 DPSP. Kemeninves/BKPM merencanakan kegiatan forum bisnis promosi investasi daerah pada tahun 2022. Adapun target partisipan pada forum tersebut adalah para Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) eksisting, calon investor, K/L terkait, asosiasi dan UMKM, DPMPTSP seluruh Indonesia, dan perwakilan Kedutaan Besar. Program tersebut akan dilaksanakan di 5 DPSP, bekerja sama dengan Pemda dan Badan Pelaksana Otorita.

Pada 2021, KemenPUPR telah mengerjakan 140 paket pembangunan aset KSPN senilai Rp 3,9 triliun yang tersebar di 5 DPSP. Aset-aset KSPN yang telah dibangun di 5 DPSP memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga perlu dirawat dan dikelola secara optimal. Lebih lanjut, dibutuhkan mekanisme pengelolaan aset yang profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif pada peningkatan nilai perekonomian daerah dan masyarakat sekitar.

Kemenparekraf telah melakukan pemetaan isu strategis terkait pengembangan SDM parekraf, yakni (i) pelatihan bagi SDM parekraf berdasarkan SKKNI melalui sertifikat kompetensi, (ii) penguatan value chain UMKM parekraf melalui wirausaha, (iii) pemulihan sektor parekraf melalui pembukaan peluang kerja bagi SDM parekraf, (iv) pengembangan desa wisata sebagai alternatif destinasi pariwisata, dan (v) kolaborasi dan implementasi program pengembangan sektor parekraf pada level nasional dan internasional. Untuk itu, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran sebesar Rp 145 miliar untuk pengembangan SDM Parekraf di tahun 2022.

Kemendesa PDTT telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pengurus BUMDes di beberapa daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Modul dan sertifikasi bimtek perlu disepakati antar K/L dan dikeluarkan secara satu pintu dengan mengacu pada SKKNI. Selain itu, modul pelatihan dimaksud juga perlu disinergikan dengan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP.

Pengembangan sektor parekraf di 5 DPSP pada 2022 akan lebih memperhatikan konsep pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan guna mendukung Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada 2060. Hal tersebut akan diterapkan melalui penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular.

Beberapa program ekonomi biru, hijau, dan sirkular yang akan didorong di 5 DPSP pada 2022 antara lain: (i) penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU),

(ii) penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), (iii) penerapan instrumen jasa lingkungan, (iv) pengelolaan sampah berkelanjutan, dan (v) peningkatan investasi ecotourism dan energi ramah lingkungan. Hal tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektoral, utamanya melibatkan KemenESDM, KKP, KLHK, dan Pemda.

Aplikasi monitoring pembangunan 5 DPSP berbasis Geographic Information System (GIS) telah diluncurkan oleh PT Telkom Indonesia, bekerja sama dengan tiga Badan Otorita Pariwisata dan K/L terkait. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan monitoring progres pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai K/L dan Pemda di 5 DPSP. Namun, saat ini data dari beberapa K/L belum lengkap, sehingga diperlukan kerja sama dari K/L terkait untuk pemutakhiran data di aplikasi GIS;

Kemenhub telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan aksesibilitas di 5 DPSP. Beberapa pengembangan dan pembangunan yang akan dilanjutkan pada 2022 yaitu (i) lelang naming rights 13 pelabuhan di Danau Toba, (ii) optimalisasi transportasi publik ke Borobudur, (iii) pembangunan dermaga kapal cepat dari Bali ke Mandalika, dan (iv) pembangunan tempat pemberhentian di antara jalan dari Manado ke Likupang.

Kemenkes terus melakukan percepatan vaksinasi dengan target 70% penduduk Indonesia tervaksinasi pada Desember 2021. Saat ini, jumlah penduduk tervaksinasi di Sumatera Utara dan NTT masih belum memenuhi target. Penguatan infrastruktur surveilans untuk testing dan tracing di 5 DPSP masih diperlukan, terutama di Manggarai Barat dan Lombok Tengah. Selain itu, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kelas rumah sakit di 5 DPSP menjadi tipe A pada 2022.

Kemeninves/BKPM telah melakukan Feasibility Study (FS) investasi di DPSP Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Sementara itu, FS di Danau Toba akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. FS memuat status tanah, status kerja sama, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh calon investor. Investor potensial bagi proyek 5 DPSP adalah Australia, China, dan Singapura.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, diperlukan pembangunan infrastruktur non fisik, meliputi penyiapan SDM untuk menjadi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, penataan ruang yang berkelanjutan, penghijauan lahan, dan penelitian lingkungan seperti terumbu karang dan komodo yang intensif untuk menjaga kelestarian alam.

Berdasarkan data Pemprov Sulawesi Utara, sektor pariwisata

berkontribusi sebesar 10% terhadap PDB Sulawesi Utara. Selama November 2021, Sulawesi Utara telah menerima kunjungan wisman dari RRT sebanyak 300 orang. Pengembangan Sulawesi Utara mengalami hambatan karena sebagian wilayah pengembangan masuk ke dalam kawasan konservasi. Lebih lanjut, Pemprov telah melakukan kerja sama dengan universitas di Manado terkait studi mengenai pengembangan wisata.

Holding BUMN pariwisata yang sudah terbentuk pada Oktober 2021 akan berfokus pada pengembangan Danau Toba sebagai lakeside and geopark tourism, Borobudur sebagai culture and heritage tourism, Mandalika sebagai youth and sport tourism, Labuan Bajo sebagai ecotourism destination, dan Likupang sebagai eco resort and luxury destination.

Tiga fokus utama pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang akan dilaksanakan oleh BUMN, yaitu pada sektor (i) pendidikan, (ii) lingkungan hidup, dan (iii) pelatihan dan pengembangan UMKM.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016 dan berkomitmen untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional dan 29% dengan usaha sendiri guna mencapai net zero emission pada 2060. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk menerapkan prinsip ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui ekonomi biru, hijau dan sirkular. Ke depannya, Indonesia akan menjadi negara penerima manfaat dari pergeseran paradigma ekonomi dunia melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Saat ini, beberapa negara telah menerapkan instrumen lingkungan hidup pada sektor pariwisata. Konsep serupa juga mulai diaplikasikan di Indonesia salah satunya telah diterapkan di Kepulauan Mentawai. Diperlukan langkah strategis dengan menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi melalui pengembangan konsep instrumen ekonomi lingkungan hidup pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

- **SS 3. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

Pada sasaran ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pada pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target capaian jumlah SDM yang terlatih adalah 50.000 orang. Pada 2020, berdasarkan data Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan jumlah SDM yang terlatih adalah

sebanyak 505.677 orang yang terdiri dari:

- i. Pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 95.003 orang;
- ii. Lembaga pelatihan yang terkreditasi berjumlah 112 orang;
- iii. Pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi berjumlah 407.427 orang;
dan
- iv. Pelatihan peningkatan produktifitas berjumlah 3.135 orang.

Pada 2021, program sertifikasi CHSE merupakan salah satu upaya Kemenparekraf untuk menstimulasi pemulihan perekonomian nasional sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah situasi pandemi Covid-19. Kemenparekraf telah melaksanakan sertifikasi CHSE kepada 6000 usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sucofindo merupakan badan usaha milik negara yang berwenang dan ditunjuk oleh Kemenparekraf untuk melakukan audit kepada para pelaku usaha dalam rangka sertifikasi CHSE.

BSN memiliki Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah mengakreditasi 30 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata di seluruh Indonesia. LSUP ini melakukan sertifikasi berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh BSN untuk selanjutnya melakukan sertifikasi terhadap usaha pariwisata seperti restoran, biro wisata, hotel, dan lain-lain.

Sebelumnya BSN telah bekerja sama dengan komisi teknis (komtek) Kemenparekraf dalam rangka perumusan lima SNI bagi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Perumusan lima usulan SNI tertunda karena adanya revisi peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 6 tahun 2020 terkait penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, sehingga LSUP mengacu pada peraturan menteri terkait usaha pariwisata terbaru yang tidak mengakomodir lima usulan SNI tersebut.

BSN mengusulkan agar sertifikasi CHSE dapat terintegrasikan dengan sistem SNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Nantinya, CHSE akan dikategorikan sebagai SNI sistem manajemen dengan penentuan parameter bersama antara BSN dengan Kemenparekraf. Jika sertifikasi CHSE akan diintegrasikan dengan sistem SNI, maka BSN akan mengadakan diskusi kembali dengan komtek guna merumuskan TOR SNI CHSE.

Diperlukan pengembangan skema sertifikasi CHSE dengan pembiayaan mandiri dari pemilik usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini mengacu pada bangkitnya permintaan dari pelaku usaha untuk menerapkan sertifikasi CHSE pada usahanya. Skema tersebut memerlukan pertimbangan penjamin atau assurance dari pihak ketiga yaitu

lembaga sertifikasi.

Perlu diujai kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan skema sertifikasi CHSE dengan pembiayaan mandiri, dalam rangka pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Perubahan paradigma dari pariwisata massal ke pariwisata berkualitas turut berimplikasi pada perlunya penyeragaman program sertifikasi taraf internasional yang ber-SNI, untuk peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. Tahapan dalam penetapan SNI terdiri atas:

- a. Surat pembentukan Komite Teknis dari Marves ke BSN
- b. Surat dari BSN terkait penerimaan program
- c. Pembentukan SK Keanggotaan tim perumus SNI
- d. Rapat teknis perumusan SNI
- e. Rapat koordinasi lintas lembaga untuk diseminasi
- f. Pelaksanaan jajak pendapat melalui sistem Web BSN (14 hari sampai 2 bulan)
- g. Sosialisasi Standar Internasional SDM Pariwisata

Output dari kegiatan ini adalah tindak lanjut berupa kerja sama antara BSN, Kemenparekraf, dan Kemenko Marves dalam mewujudkan sertifikasi SDM pariwisata berskala internasional. Outcome adalah SDM Pariwisata yang berstandarisasi Internasional.

Instansi	SDM Terlatih	SDM Tersertifikasi
Kementerian / Lembaga	19.902	5.361
Pemerintah Daerah	7.218	1.641
Total	27.120	7.002

Gambar 11. Data Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

- **SS 4. Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Sasaran strategis 4 adalah Terwujudnya Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dengan capaian indikator mendapatkan 5 Tata

Kelola. Realisasi pada tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditentukan. 5 tata Kelola tersebut di tahun 2021 adalah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang diantaranya adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo dan Likupang. Selain itu, juga dilakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terhadap pengembangan destinasi pariwisata lainnya seperti pada pengembangan destinasi pariwisata Banyuwangi, Belitung, Aceh Singkil, Bali, dan Geopark di Indonesia melalui Indonesia Geopark Summit.

Rangkaian kegiatan Indonesia Geopark Summit 2021 terdiri dari virtual learning and advisory assessment, Konferensi Nasional Geopark II, Geopark Investment Forum, dan Geopark Virtual Exhibition. Kegiatan virtual learning dan advisory assessment telah dilaksanakan pada 25 Oktober - 2 November 2021. Beberapa Geopark dilibatkan dalam kegiatan ini di antaranya Geopark Maros Pangkep, Geopark Ijen, dan aspiring Geopark Gorontalo.

Konferensi Nasional Geopark II dilaksanakan pada 22 November 2021 secara virtual. Dalam rangkaian kegiatan ini, Presiden RI memberikan sambutan dan menyerahkan sertifikat kepada UGGp Kaldera Toba dan UGGp Belitung. Selanjutnya, sejumlah menteri juga mengisi keynote speech pada kegiatan ini. Kegiatan Geopark Investment Forum dan Virtual Exhibition dilaksanakan pada 23 November 2021 secara hybrid di Kaldera Toba. Sambutan kegiatan ini diisi oleh Menteri Investasi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 12. Kegiatan Indonesia Geopark Summit 2021

- **SS 5. Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif**

Terwujudnya pusat unggulan Ekonomi Kreatif, diwujudkan dalam pembangunan creative hub di masing-masing DPSP, yaitu Danau Toba,

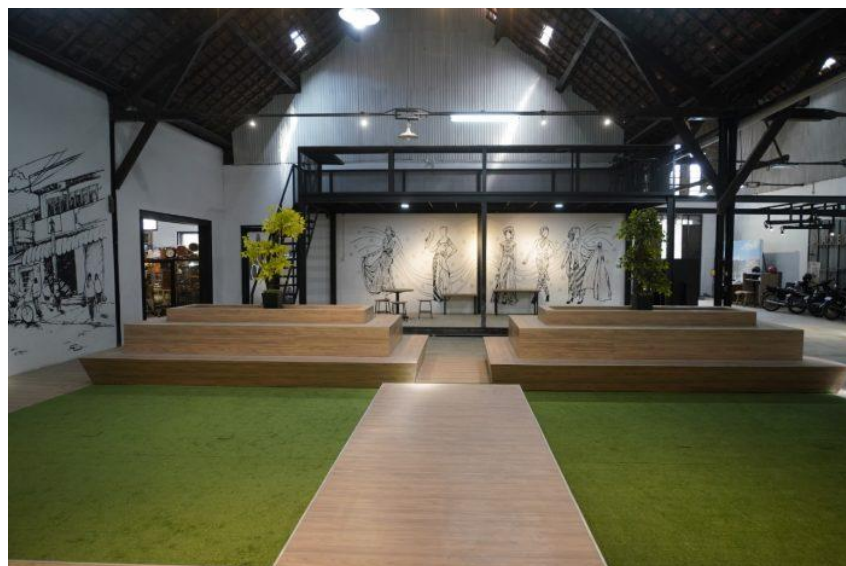
Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Sepanjang 2021, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pembangunan dan pengembangan creative hub di lima DPSP dan mendapatkan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pembangunan creative hub di DPSP Labuan Bajo, tepatnya di Puncak Waringin sudah selesai.



Gambar 13. Creative Hub Di DPSP Labuan Bajo

2. Pembangunan creative hub di DPSP Borobudur tepatnya di kawasan kota lama Semarang sudah selesai.



Gambar 14. Creative Hub Di DPSP Borobudur

3. Pembangunan creative hub di DPSP Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Samosir masih tahap proses penandatanganan dokumen legalitas. Konsultan perencana akan ditunjuk untuk pembuatan design pada creative hub dan akan menyusun DED, RAB, serta RKS. Bappeda Samosir juga menawarkan alternatif pilihan lokasi lain yang

sudah dibebaskan, dan BPODT juga menawarkan lokasi alternatif di Parapat dan Sibisa;

4. rencana pembangunan creative hub di Manado dan Mandalika masih dalam proses koordinasi dengan calon penerima atau pengelola dan K/L terkait penentuan lokasi creative hub. PT ITDC memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan creative hub di Mandalika dengan infrastruktur (jalan, akses, air, dan listrik) yang sudah tersedia. Selain itu konsep pembangunan juga sudah ada tema Pasar Seni yang bersifat sebagai wadah atau sarana komunitas seni. Sekretaris Daerah Manado sedang membahas penentuan lokasi pembangunan creative hub di Manado. Ada dua lokasi yang di tahap diskusi yaitu Souvenir Shop yang terletak di Teluk Manado dan PT MRDP memiliki konsep untuk pengembangan creative hub di Likupang.

- **SS 6. Terwujudnya Ketersediaan Akses Permodalan Industri Pariwisata Dan Industri Ekonomi Kreatif**

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah ketersediaan permodalan, dalam hal ini investasi atau penanaman modal dalam sektor parekraf. Sementara itu IK nilai penanaman modal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif adalah jumlah penanaman modal di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik dari/oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penghitungan nilai penanaman modal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang di rilis setiap triwulan. Adapun sektor yang menjadi dasar perhitungan adalah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI). Dalam data yang dirilis BKPM terdapat 23 sektor. Sementara untuk menghitung nilai dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri dari sektor: hotel dan restoran, industri tekstil, dan industri barang dari kulit dan alas kaki. Penanaman modal yang dihitung adalah baik penanaman modal dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berdasarkan data dari BKPM, pada 2020 realisasi penanaman modal pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar Rp31,069 triliun. Sementara itu, pada 2021 realisasi penanaman modal pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar Rp 33,405 triliun.

No.	Sektor	PMA			PMDN		TOTAL
		Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)	Nilai (Rp Miliar)	Proyek	Nilai (Rp Miliar)	Nilai (Rp Miliar)
1	Hotel dan Restoran	7.973	245,1	3.569,78	11.185	15.468,8	19.038,58
2	Industri Tekstil	2.090	221,4	3.225,88	1.917	7.344	10.569,88
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.505	225,3	3.277,13	367	519,3	3.796,74
Total		12.568	691,8	10.072,79	6.982	12.701	33.405,19

Gambar 15. realisasi penanaman modal pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Selain itu, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan kegiatan koordinasi manajemen investasi BUMN dan Swasta di lima DPSP. Hal ini untuk menindaklanjuti amanat hasil Rapat Koordinasi Nasional 2020 terkait program investasi untuk pengembangan kawasan lima DPSP pada 2021.

Pada umumnya, kendala utama investasi di DPSP Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo adalah pembangunan akses jalan raya dan infrastruktur dasar lainnya. Oleh karena itu, Kemenparekraf membentuk tim khusus untuk proses percepatan investasi di lima DPSP. Saat ini, Kemenparekraf sedang mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur di lima DPSP untuk kemudian akan diajukan oleh Menteri Parekraf kepada Menteri PUPR, serta Menko Marves.

Selain itu, Menteri Parekraf akan mengajukan pembuatan cable car kepada BUMN untuk menjadi salah satu atraksi utama di Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo. Saat ini, tiga BPO masih menunggu proses pembentukan Badan Layanan Umum agar dapat menarik lebih banyak investor secara langsung ke kawasannya masing-masing.

Sesuai ketentuan yang berlaku, KEK harus mulai beroperasi 3 tahun sejak penetapan awalnya. KEK Likupang ditetapkan pada tahun 2018, sesuai perhitungan harus mulai beroperasi pada Desember 2022. MPRD membutuhkan dispensasi perpanjangan masa operasi KEK karena terkendala kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat pembangunan dan masuknya investor ke KEK Likupang. Lebih lanjut, pengajuan ini perlu dibahas dengan Kemenko Perekonomian.

Perkembangan program investasi di DPSP Danau Toba adalah sebagai berikut:

- a. kawasan Toba Caldera Resort merupakan area seluas 386 Ha, dimana 30,2% merupakan lahan untuk investasi hotel dan resort. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan properti yang sudah menyatakan

- minat untuk berinvestasi di kawasan Toba Caldera Resort. Terdapat dua calon investor yang berminat untuk membangun hotel/resort di kawasan SR-5, yaitu PT Hutahaeen Grup dan PT Toba Indah Mas;
- b. selain itu, Bobobox (Bobocabin) telah berinvestasi di area CV-11 di Toba Caldera Resort dan sudah beroperasi sejak 5 Juli 2021. Terdapat 4 kabin yang telah beroperasi dan direncanakan ada 30 kabin yang akan dibangun dengan target penyelesaian pada 2021. Kontrak kerja sama dilakukan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang hingga 15 tahun;
 - c. perlu dukungan percepatan infrastruktur dasar, seperti jalan akses masuk kawasan dan pipa air bersih untuk mempercepat proses investasi dan pembangunan. Saat ini, sedang dilakukan pengerasan jalan masuk ke kawasan Toba Caldera Resort sepanjang 7,2 km dan lebar 18 meter, sebagai akses masuk dan jalur distribusi peralatan pembangunan bagi para investor. Namun, masih membutuhkan bantuan PUPR untuk percepatan perbaikan jalan hingga 2022; dan
 - d. pada 2020, PUPR telah menarik pipa air bersih dari sungai di Toba dan Simalungun hingga penampungan (*reservoir*) air di kawasan Gunung Gideon. Namun dari lokasi tersebut menuju Toba Caldera Resort masih berjarak 5 Km. Dibutuhkan akses yang lebih dekat untuk memperlancar distribusi air bersih;

Perkembangan program investasi di DPSP Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

- a. BPOLBF telah mendapat dispensasi dari KLHK untuk memulai pembangunan di kawasan lahan otorita seluas 14 Ha pada Lahan APL (135 Ha), melalui Surat Menteri LHK Nomor S.220/MenLHK/Setjen/PLA.2/5.2021 tertanggal 31 Mei 2021. Proses penyelesaian SK APL 2021 akan dilakukan secara paralel bersamaan dengan pembangunan yang sedang berjalan;
- b. selain itu, BPOLBF sedang mengajukan diskresi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Pemanfaatan Jasa Lingkungan PBPH-JL (264 Ha). Perubahan peraturan berdasarkan Permen LHK hanya mengatur pengajuan ijin oleh badan usaha/BUMN/individu/koperasi, sehingga BPOLBF sebagai Unit Satuan Kerja dibawah Kemenparekraf, belum dapat menggunakan lahan PBPH-JL untuk pembangunan dan pengembangan kawasan;
- c. Dusit International (perusahaan properti asal Oman) telah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di area *Family Hotel Resort di Cultural District*. Selain itu, investor *Production House* asal Bali dan Polandia berencana membangun *studio rendering* dan produksi untuk menjadi destinasi produksi film di Labuan Bajo. Lebih lanjut, investor tersebut membutuhkan fasilitasi khusus terkait izin masuk peralatan produksi dan pelaksanaan produksi film;

- d. perlu dilakukan percepatan pembangunan akses masuk dan jalan di kawasan lahan otorita sepanjang 6,2 Km oleh PUPR, agar investor dapat segera melakukan *groundbreaking* hotel bintang 4/5 pada 2022. Hal tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan Pemprov NTT terkait pembatasan izin pembangunan hotel pada akhir 2022; dan
- e. berdasarkan regulasi, BPOLBF tidak dapat menggunakan anggarannya untuk pembangunan jalan raya, sehingga butuh dukungan anggaran dari KemenPUPR. Total kebutuhan anggaran adalah Rp 250 miliar yang dapat dibagi pada 2 tahun anggaran, yaitu Rp 50 miliar pada TA 2021 dan Rp 200 miliar pada TA 2022. BPOLBF telah bersurat kepada Dirjen Bina Marga, KemenPUPR; serta berkoordinasi dengan Bupati Manggarai Barat dan Kantor Staf Presiden terkait permohonan pembangunan jalan kawasan otorita;

Perkembangan program investasi di DPSP Borobudur adalah sebagai berikut:

- a. pada kawasan lahan otoritatif Borobudur, terdapat 19 lot yang ditawarkan untuk area investasi. Saat ini, 8 lot telah diminati oleh Luxor Group, Magnaland Group, dan Arasatu Group;
- b. selain itu, terdapat beberapa investor yang berminat membangun hotel dan resto di kawasan Candi Borobudur, Kab. Magelang, serta Jateng Valley berencana membangun properti di Ungaran, Jawa Tengah; dan
- c. proses pembangunan di lahan otorita terkendala akses masuk dari Plono. Perlu dilakukan pelebaran jalan pada akses masuk kawasan sepanjang 6 Km. Untuk tahun 2021, PUPR tidak dapat menganggarkan pengembangan jalan karena terkendala *refocusing* anggaran. Lebih lanjut, akan dianggarkan oleh PUPR pada TA 2022 dan akan mulai dikerjakan pada awal tahun 2022, dengan estimasi pengerjaan selama 6-7 bulan. Saat ini, sedang dilakukan penyusunan dokumen administrasi, DED jalan, dan proses pembebasan lahan;

Perkembangan program investasi di DPSP Mandalika adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan kontrak pada *loan agreement*, PT ITDC memiliki dua investasi besar di DPSP Mandalika, yaitu *Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project* (MUTIP) Paket I dan II dengan total anggaran Rp3,6 triliun hingga 2024. Progres saat ini, telah terkontrak sebesar Rp1,8 triliun, serta terdapat beberapa investor besar berinvestasi melalui *join venture*. Anggaran MUTIP terbagi menjadi Paket I sebesar Rp1,04 triliun dan Paket II sebesar Rp 753 miliar;
- b. saat ini, pembangunan pembangunan Sirkuit Mandalika sedang dipercepat untuk segera dilakukan serah-terima. Percepatan juga

dilakukan sebagai persiapan penyelenggaraan *event* internasional di Mandalika;

- c. selain itu, pembangunan Hotel Pullman di kawasan Mandalika dengan nilai investasi sekitar Rp 700 miliar telah selesai dan akan dilakukan *soft opening* 2 bulan ke depan;

Perkembangan program investasi di DPSP Likupang adalah sebagai berikut:

- a. beberapa investor asing menunda pembangunan di DPSP Likupang karena terkendala oleh kondisi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, PT MPRD akan berfokus untuk mencari investor dalam negeri dan menyusun beberapa alternatif pembangunan di area KEK;
- b. Dirut MPRD telah bertemu dengan Menparekraf untuk membahas rencana pengembangan Area C sebagai alternatif pembangunan *sport center* dan akan mencari investornya. *Sport tourism* saat ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan;
- c. sebagai alternatif lain, MPRD bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Utara membuat *Community Place*, berkonsep *Mini Cultural Village*, pada lahan seluas 6 Ha di area Pantai Paal. Konsep tersebut akan ditawarkan oleh Pemkab Minahasa Utara kepada beberapa kementerian untuk berinvestasi sesuai sektornya, antara lain (1) *Cultural Training Center* kepada Kemendikbud Ristek; (2) *Human Resource Training Center* untuk Kemenparekraf; (3) *Culinary Bazaar* untuk Kemendag; (4) *Art Market* untuk KemenkopUMKM; dan (5) *Mini Amphitheater & Performing Space* untuk Kemenparekraf; dan
- d. beberapa hal yang diusulkan MPRD untuk ditindaklanjuti adalah (1) dana PEN melalui ITDC untuk infrastruktur jalan dan destinasi budaya, (2) skema pendanaan untuk para investor lokal melalui Himbara, (3) percepatan dukungan pendanaan dari kementerian melalui Pemkab Minahasa Utara, (4) bantuan pendanaan pembuatan *Feasibility Study* untuk *Sport Center* melalui Kemenparekraf untuk mempercepat pencarian investor.

No	Provinsi (DPP)	Proyek Investasi	Indikasi Pendanaan (Rp Miliar)
1	Sumatera Utara (DPP Danau Toba)	PT Bobobox Aset Manajemen	15
		Pembangunan Hotel Bintang 5 di Lot SR-05	925
2	Jawa Tengah – DI.Yogyakarta (DPP Borobudur dskt)	Bobobox 20 Cabin @ Rp. 200 juta di Zona Otorita	4
		PT Luxor Graha Proportiondo : Ground Breakin dan Persiapan Konstruksi di Zona Otorita	2
		DeLoano Tent Resort di Zona Otorita	2
		Dafam Hotel di Kab. Kulonprogo	80
		Novotel dan Ibis Hotel di Kab. Kulonprogo	120
3	Nusa Tenggara Barat (DPP Lombok – Mandalika)	PT ITDC (Kontrak Paket II Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project/MUTIP)	1.700
4	Nusa Tenggara Timur (DPP Labuan Bajo)	Qatar Investment Authority & RPG (Hotel Westin dan St Regis)	5.800
		Dusit Internasional di Lahan Otorita	120
		Consina Glamping di Lahan Otorita	2
		Kawasan Mawatu	10.000
		Hotel Grand Melia; Pulau Purung	TBC
		Bandara Changi	87
		Kokotuku Sanctuary	700
		ITDC Tana Mori	300
		BUMD Fiobamor Pengelolaan Konkuren TN Komodo	300
		Pelindo III Terminal Peti Kemas Wae Kelambu	70
5	Sulawesi Utara (DPP Manado Likupang)	Fase 2 Pembangunan The Pulisan	32,5
6	Maluku Utara (DPP Morotai)	PT Morotai Paradis Resor	350
		PT Royal Castle Investment	7.500
7	Kep. Bangka Belitung (DPP Bangka Belitung)	PT. Belitung Pantai Intan (Belpi)	2.200
		PT Setra Gita Nusantara (Sheraton Belitung Resort)	500
TOTAL			30.809,5

Gambar 16. Pemetaan Indikatif Rencana Investasi Swasta pada Destinasi Pariwisata Prioritas Untuk Tahun 2022

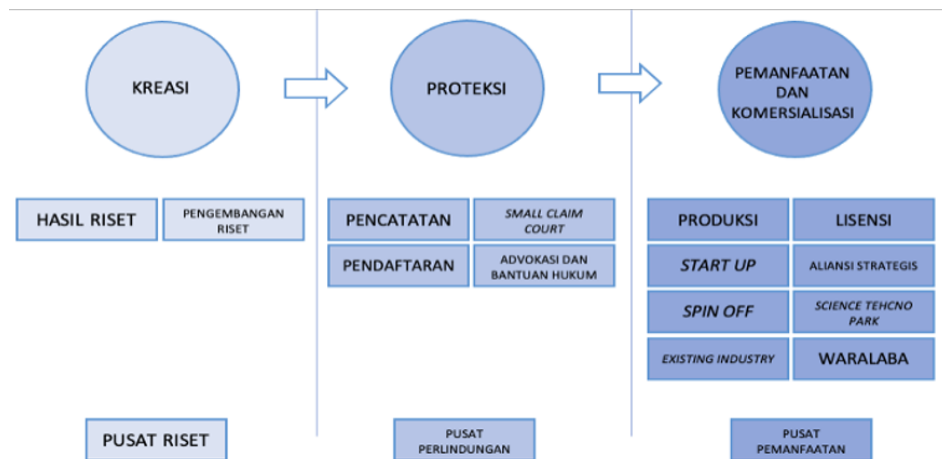
- **SS 7. Terwujudnya Perlindungan Dan Nilai Keekonomian Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

Indonesia masih bertumpu pada sektor pemanfaatan SDA yang bersifat *material* dengan jumlah cadangan yang terbatas, dan *trend* dunia yang berfokus pada pengurangan penggunaan SDA (*net zero emission*) pada 2030. Selain itu, tercatat pendapatan negara atas sektor SDA terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir.

Pada 2020, jumlah produk/jasa yang difasilitasi mendaftar kekayaan intelektual adalah sebanyak 1.250 produk dan jasa. Sementara itu, sepanjang 2021 jumlah produk/jasa yang difasilitasi mendaftar kekayaan intelektual adalah sebanyak 300 produk dan jasa.

Diharapkan KI sebagai sektor yang bertumpu pada sumber daya *immaterial* yang tidak akan pernah habis yaitu SDM, dapat menjadi salah satu sektor penopang penerimaan negara pada 2030. Telah dilaksanakan pemetaan strategi nasional KKI, dimana langkah awal yang akan dilakukan adalah pembentukan sistem hulu-hilir KI melalui pembagian peran K/L di Indonesia.

Tahun 2022 akan difokuskan pada pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan KI yang bersifat massal dan masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas KI. Program agar dapat dilaksanakan menjadi tiga tahap antara lain (i). penguatan pemerintah pusat, dimana melibatkan seluruh kementerian dan Lembaga, (ii) penguatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, (iii) penguatan masyarakat.



Gambar 17. Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI

- **SS 8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

Pada sasaran ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pada pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target capaian jumlah SDM yang terlatih adalah 50.000 orang. Pada 2020, berdasarkan data Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan jumlah SDM yang terlatih adalah sebanyak 505.677 orang yang terdiri dari:

- Pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 95.003 orang;
- Lembaga pelatihan yang terkakreditasi berjumlah 112 orang;
- Pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi berjumlah 407.427 orang; dan
- Pelatihan peningkatan produktifitas berjumlah 3.135 orang.

Pada 2021, program sertifikasi CHSE merupakan salah satu upaya Kemenparekraf untuk menstimulasi pemulihan perekonomian nasional sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah situasi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kemenparekraf telah melaksanakan sertifikasi CHSE kepada 6000 usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sucofindo merupakan badan usaha milik negara yang berwenang dan ditunjuk oleh Kemenparekraf untuk melakukan audit kepada para pelaku usaha dalam rangka sertifikasi CHSE.

BSN memiliki Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang pada tahun 2020 telah mengakreditasi 30 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata di seluruh Indonesia. LSUP ini melakukan sertifikasi berdasarkan SNI yang dikeluarkan oleh BSN untuk selanjutnya melakukan sertifikasi terhadap usaha pariwisata seperti restoran, biro wisata, hotel, dan lain-lain.

Sebelumnya BSN telah bekerja sama dengan komisi teknis (komtek) Kemenparekraf dalam rangka perumusan lima SNI bagi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Perumusan lima usulan SNI tertunda karena adanya revisi peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 6 tahun 2020 terkait penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, sehingga LSUP mengacu pada peraturan menteri terkait usaha pariwisata terbaru yang tidak mengakomodir lima usulan SNI tersebut.

BSN mengusulkan agar sertifikasi CHSE dapat terintegrasikan dengan sistem SNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Nantinya, CHSE akan dikategorikan sebagai SNI sistem manajemen dengan penentuan parameter bersama antara BSN dengan Kemenparekraf. Jika sertifikasi CHSE akan diintegrasikan dengan sistem SNI, maka BSN akan mengadakan diskusi kembali dengan komtek guna merumuskan TOR SNI CHSE.

Diperlukan pengembangan skema sertifikasi CHSE dengan pembiayaan mandiri dari pemilik usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini mengacu pada bangkitnya permintaan dari pelaku usaha untuk menerapkan sertifikasi CHSE pada usahanya. Skema tersebut memerlukan pertimbangan penjamin atau assurance dari pihak ketiga yaitu lembaga sertifikasi.

Perlu dijajaki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan skema sertifikasi CHSE dengan pembiayaan mandiri, dalam rangka pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Perubahan paradigma dari pariwisata massal ke pariwisata berkualitas turut berimplikasi pada perlunya penyeragaman program sertifikasi taraf internasional yang ber-SNI, untuk peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. Tahapan dalam penetapan SNI terdiri atas:

- a. Surat pembentukan Komite Teknis dari Marves ke BSN
- b. Surat dari BSN terkait penerimaan program
- c. Pembentukan SK Keanggotaan tim perumus SNI

- d. Rapat teknis perumusan SNI
- e. Rapat koordinasi lintas lembaga untuk diseminasi
- f. Pelaksanaan jajak pendapat melalui sistem Web BSN (14 hari sampai 2 bulan)
- g. Sosialisasi Standar Internasional SDM Pariwisata

Output dari kegiatan ini adalah tindak lanjut berupa kerja sama antara BSN, Kemenparekraf, dan Kemenko Marves dalam mewujudkan sertifikasi SDM pariwisata berskala internasional. Outcome adalah SDM Pariwisata yang berstandarisasi Internasional.

Instansi	SDM Terlatih	SDM Tersertifikasi
Kementerian / Lembaga	19.902	5.361
Pemerintah Daerah	7.218	1.641
Total	27.120	7.002

Gambar 18. Data Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

- **SS 10. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat mampu melaksanakan tugas jabatannya. Untuk mengetahui SDM yang kompeten di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah dilakukan penilaian standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Standar yang dinilai meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Pengukuran kompetensi tersebut sudah mengikuti Peraturan Menteri PAN RB No 38 Tahun 2017. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan selama 2021 untuk mencapai IKU tersebut adalah:

- a. penyusunan dokumen Analisis Kebutuhan Pelatihan CPNS Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan pelatihan CPNS Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Modul Pelatihan CPNS Tahun 2021

Hari dan Tanggal	Waktu (WIB)	Mata Agenda Pelatihan	Narasumber/Fasilitator	Output
APRIL				
Senin, 5 April 2021	09.00 - 10.00	Table manner	Protokol Kemlu	Pemahaman prinsip-prinsip dasar etika dan sopan santun dalam jamuan makan, terutama jamuan dinas dan resmi
Senin, 12 April 2021	09.00 - 10.00	Dress Up	Khairiyah Sari	Pemahaman cara berpakaian yang layak, sesuai konteks, tepat dan menarik, sehingga dapat merepresentasikan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Senin, 19 April 2021	09.00 - 10.00	Self Management	Pramitha Aulia	Pemahaman mengenai cara mengontrol diri pada situasi di lingkungan kerja
Senin, 26 April 2021	09.00 - 10.00	Presentation Skill	Wening Hesti Nawa Ruci	Pemahaman cara presentasi yang baik, benar, dan menarik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap audiens
MEI				
Senin, 3 Mei 2021	09.00 - 10.00	Design Thinking	Marthella Rivera Roidatua	Pemahaman dalam meningkatkan pemikiran yang lebih luas
Senin, 10 Mei 2021	09.00 - 10.00	Effective Communication	Zahra Noor Eriza	Pemahaman mengenai komunikasi yang efektif agar dapat menyampaikan dengan baik ke stakeholders
Senin, 24 Mei 2021	09.00 - 10.00	Manajemen Konflik	Gde Suardhika	Pemahaman dalam mengatasi permasalahan di dalam lingkungan kantor
Senin, 31 Mei 2021	09.00 - 10.00	Teamwork	Ibu Ranitya Nurita	Pemahaman dalam kerja sama tim

Gambar 19. Modul Pelatihan CPNS Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

- c. kegiatan penyusunan SKP Periode Juli-Desember 2021



Gambar 20. Kegiatan Penyusunan SKP, Bandung 20-22 Desember 2021

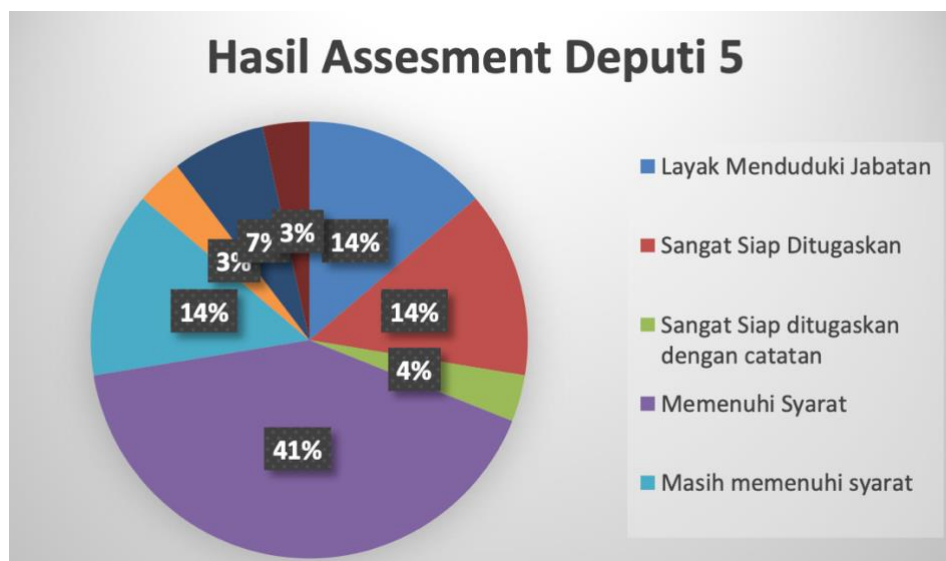
- d. kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Aplikasi SAKTI;
 e. kegiatan BIMTEK Aplikasi SRIKANDI; dan
 f. kegiatan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2022.

Berdasarkan rekapitulasi dari hasil assessment yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian dari 29 (dua puluh Sembilan) pegawai di Deputi V mendapatkan nilai pada layak menduduki jabatan sebanyak 4 (empat), sangat siap ditugaskan sebanyak 4 (empat), sangat siap ditugaskan

dengan catatan sebanyak 1 (satu), memenuhi syarat 12 (dua belas), masih memenuhi syarat sebanyak 4 (empat), potensial sebanyak 1 (satu), cukup potensial sebanyak 2 (dua) dan belum layak menduduki jabatan sebanyak 1 (satu).

No	Nilai Assesment	Jumlah Pegawai
1	Layak menduduki jabatan	4
2	Sangat siap ditugaskan	4
3	Sangat siap ditugaskan dengan catatan	1
4	Memenuhi syarat	12
5	Masih memenuhi syarat	4
6	Potensial	1
7	Masih potensial	2
Total		29

Tabel 4. Nilai Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 21. Grafik Nilai Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **SS 11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Reformasi birokrasi yang efektif hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut tentunya dilakukan di dalam program yang berada di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, terdapat 2 (dua) IKU di Deputy Bidang Koordinasi

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Deputi dan Nilai PMPRB Deputi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan evaluasi penilaian bagi unit kerja dengan 3 (tiga) indikator, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pada Triwulan IV Tahun 2020, Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **64.51** atau **Tingkat Akuntabilitas Kinerja “B”** dengan predikat Kategori **“Baik”**

Sementara itu, pada triwulan IV tahun 2021, Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **67.42** atau **Tingkat Akuntabilitas Kinerja “B”** dengan predikat Kategori **“Baik”**. Adapun rincian hasil evaluasi implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	43	31.28
2	Pengukuran Kinerja	36	23.14
3	Pelaporan Kinerja	21	16.00
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Tabel 5. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau disingkat PMPRB merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh unit kerja dengan terpenuhinya dokumen reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi



Gambar 22. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-9/INS/MARVES/WAS/VI/2021 dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perihal Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai PMPRB sebesar **86.06%**.

Pada 2020, penilaian PMPRB di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dilaksanakan sesuai arahan dari Sekretaris Semenke dan didapatkan nilai sangat memuaskan yaitu nilai 19,78 atau **91,2%**.

- **SS 12. Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel adalah salah satu target sasaran capaian di Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian target yang dicapai adalah 60. Target sasaran ini dapat dilihat dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau disingkat IKPA.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada 2020, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai IKPA sebesar 88,70. Sementara itu, Berdasarkan Nota

Dinas dari Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: ND-072/001/03/SESMENKO/MARVES/II/2022 perihal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai IKPA sebesar **94.60**.

No	Unit Kerja Eselon I	Nilai IKPA
1.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	95,60
2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	98,40
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	97,00
4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	94,35
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	94,60
6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	95,43
7.	Sekretariat Kementerian Koordinator	95,22

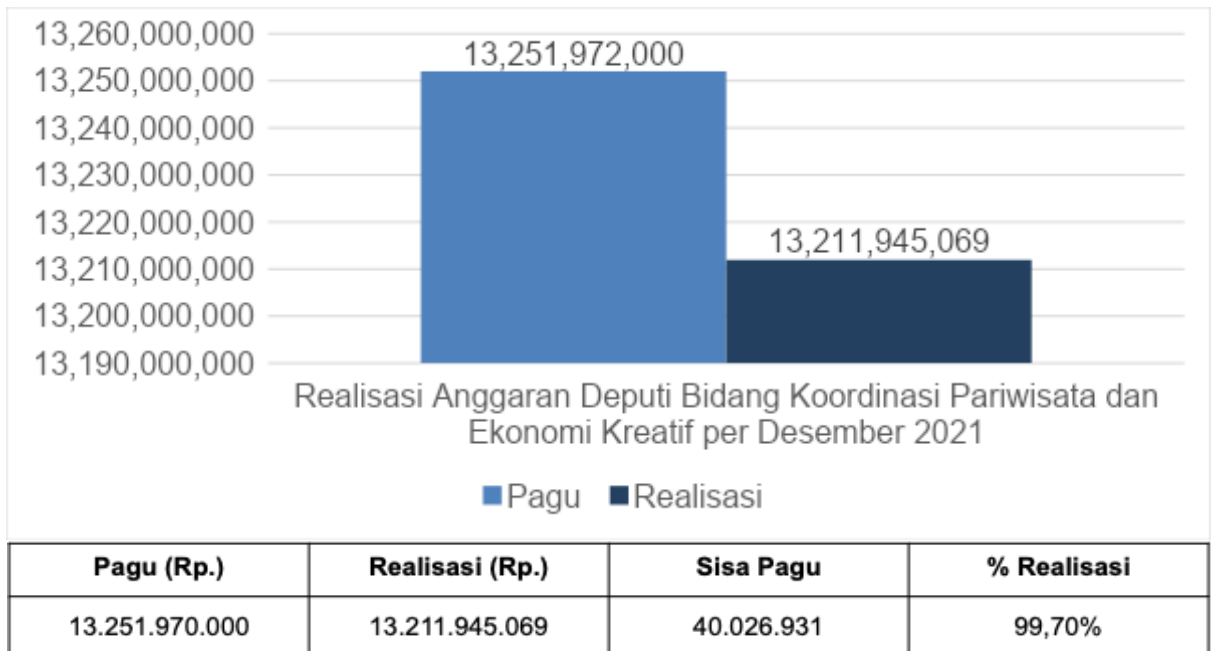
Gambar 23. Hasil Penilaian IKPA Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan penyajian informasi tentang alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan besaran nilai serta besaran persen yang telah dilakukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung oleh penganggaran yang memadai dan sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp13.211.945.069 dengan nilai presentase 99,70%.

Unit	Pagu	Realisasi Pagu	%	Sisa Pagu	%
Sekretariat Deputi	3.050.622.000	3.044.775.860	99,81%	5.846.140	0,19%
Asdep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	1.861.350.000	1.826.977.059	99,78%	3.972.941	0,22%
Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.085.000.000	4.154.641.346	99,75%	10.390.654	0,25%
Asdep Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.485.000.000	1.456.460.826	99,93%	1.039.174	0,07%
Asdep Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.285.000.000	1.267.753.529	98,90%	14.146.471	0,1%
Asdep SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.485.000.000	1.461.336.449	99,68%	4.631.551	0,32%
Total	13.251.972.000	13.211.945.069	99,70%	40.026.931	0,3%

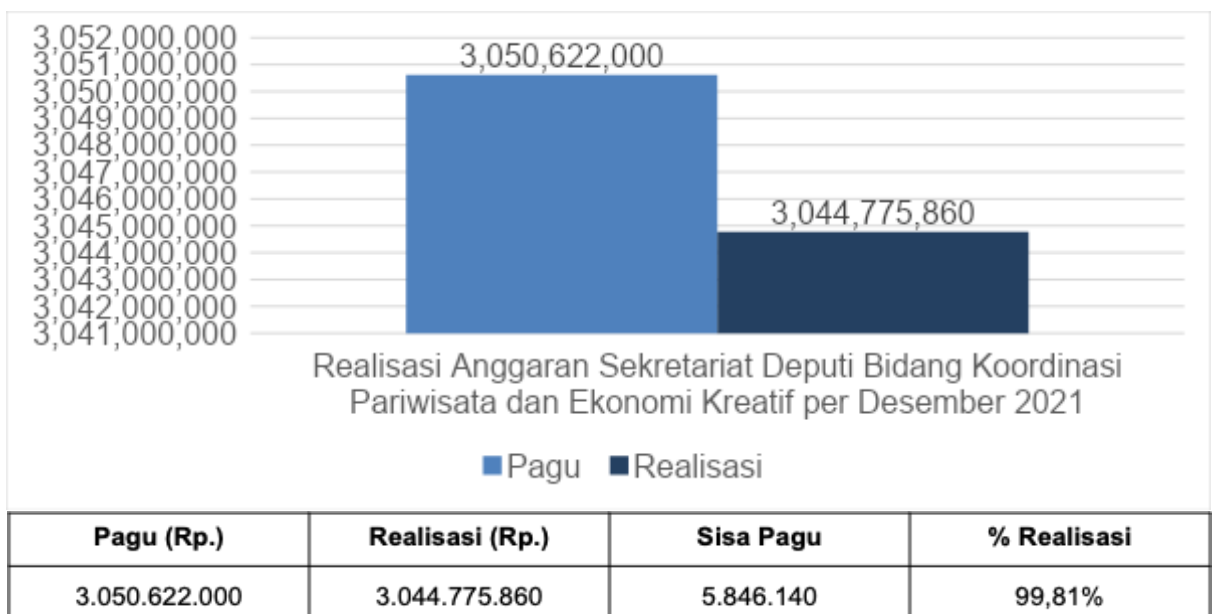
Tabel 6. Realisasi Anggaran Esselon II Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Per 31 Desember 2021



Gambar 24. Grafik Realisasi Anggaran Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Realisasi Anggaran Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

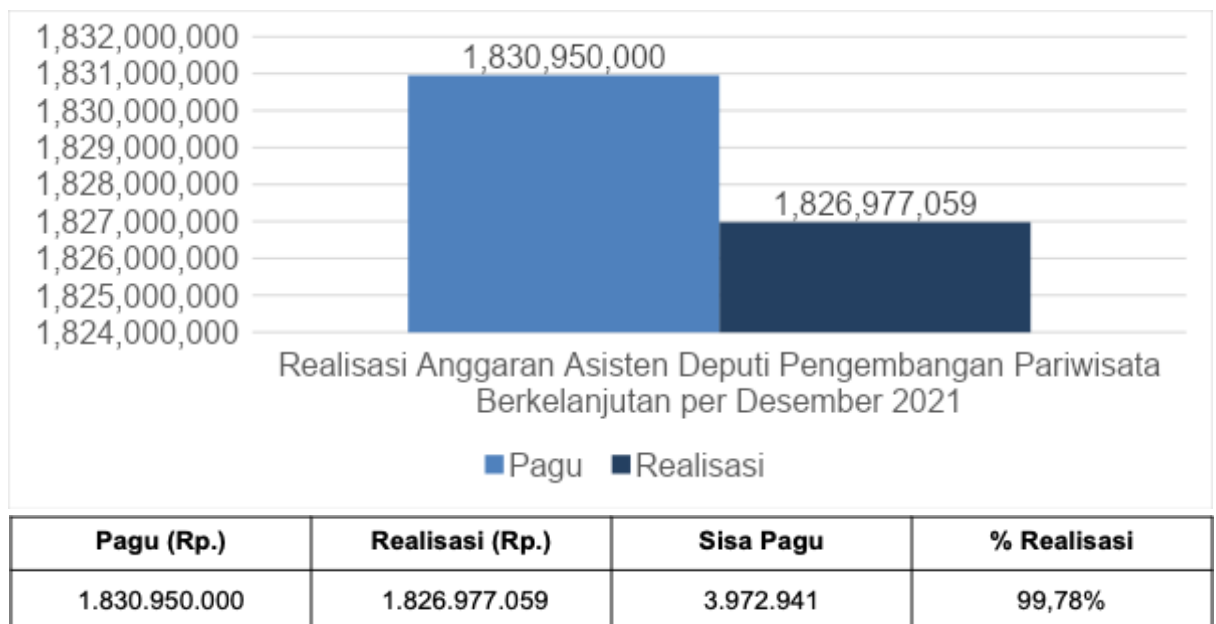
Realisasi anggaran di Sekretariat Deputy didapatkan sebesar Rp3.044.775.860,- atau dengan nilai persentase 99,81% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp3.050.622.000,-. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 25. Grafik Realisasi Anggaran Sekretariat Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan**

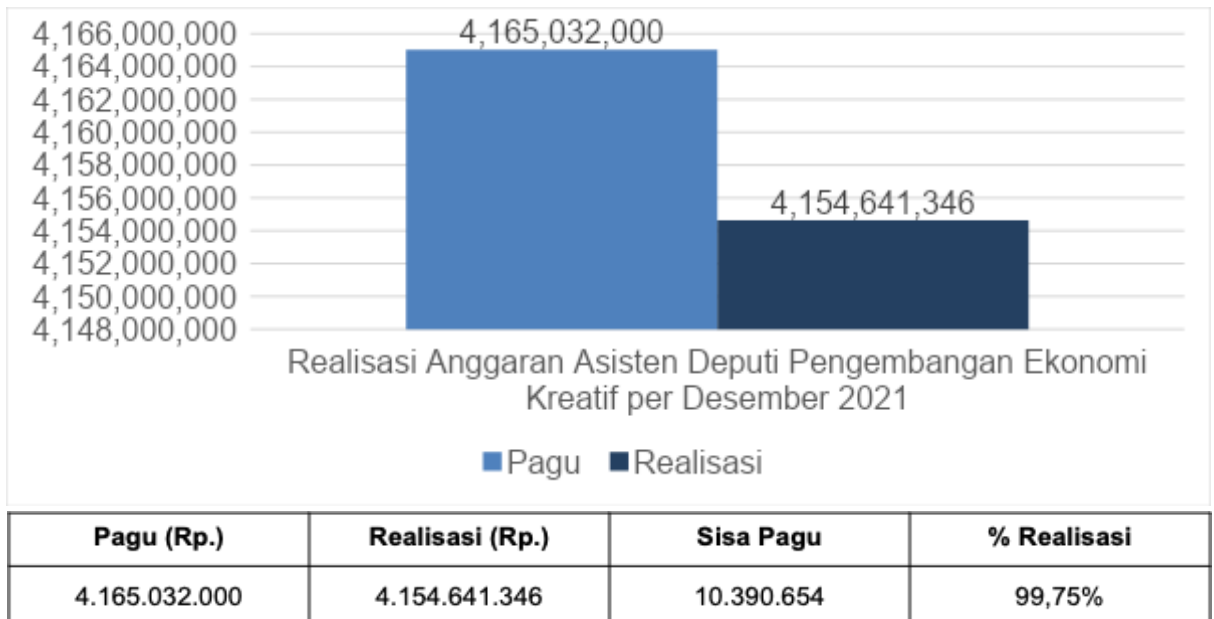
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan didapatkan sebesar Rp1.826.977.000,- atau dengan nilai persentase 99,78% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp1.830.950.000,- . Terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 26. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

- **Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif**

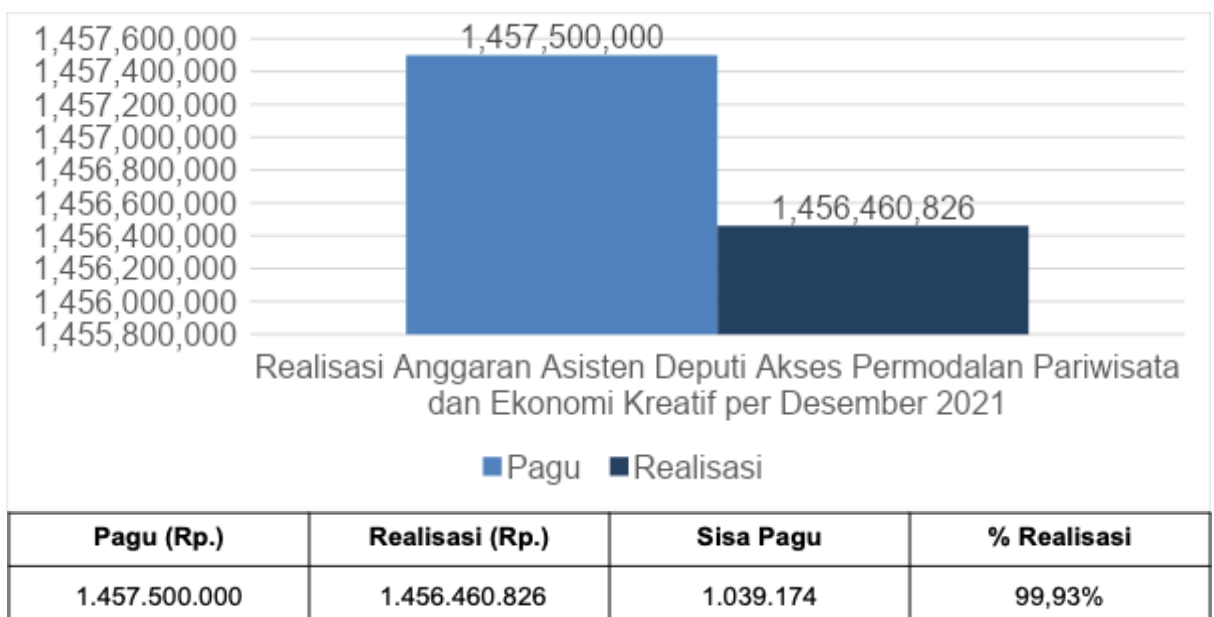
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp4.154.641.346,- atau dengan nilai persentase 99,75% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp4.165.032.000,-. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 27. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

- **Realisasi Anggaran Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

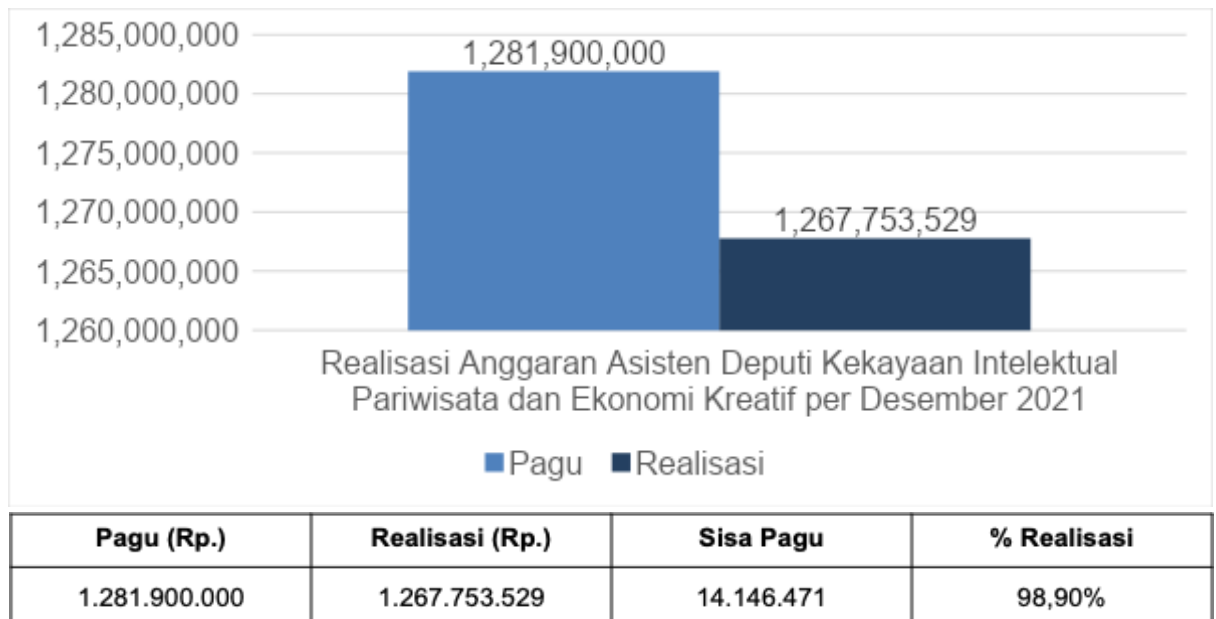
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp1.456.460.826,- atau dengan nilai persentase 99,93% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp1.457.500.000,-. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 28. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

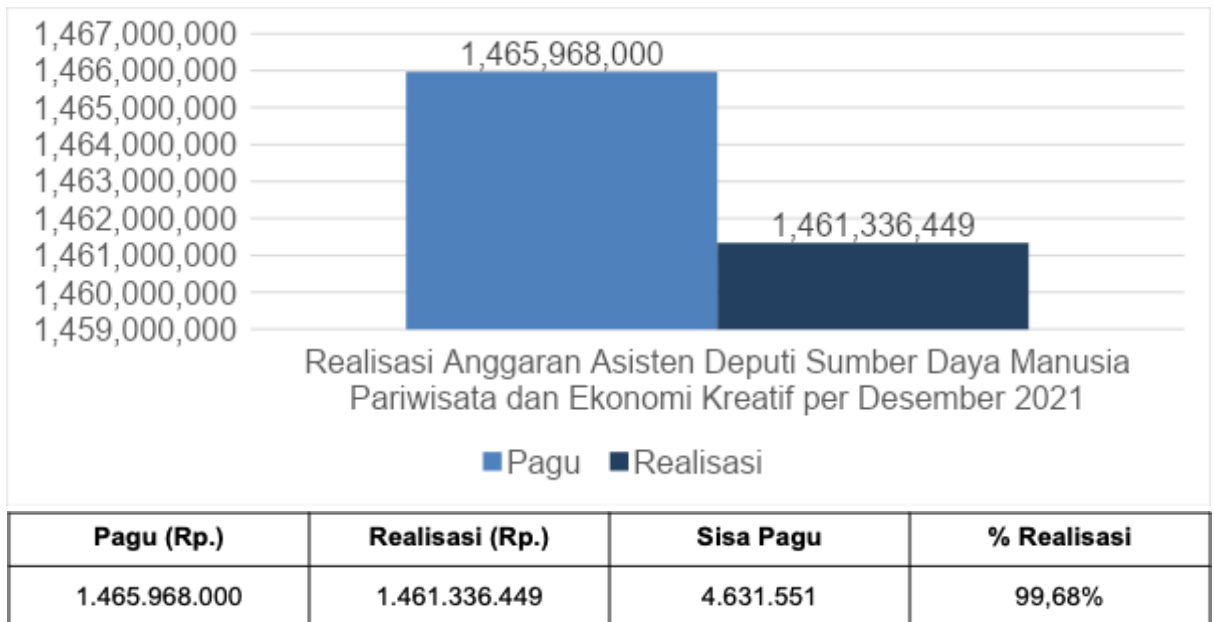
Realisasi anggaran di Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp1.267.753.529,- atau dengan nilai persentase 98,90% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp1.281.900.000,-. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 29. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Realisasi anggaran di Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didapatkan sebesar Rp1.461.336.449,- atau dengan nilai persentase 99,68% dari ketersediaan anggaran yang aktif sebesar Rp1.465.968.000,-. Berikut terlampir detail data pagu dan realisasi beserta grafiknya.



Gambar 30. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif









BAB IV PENUTUP





Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perencanaan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam mencapai tujuannya, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator kinerja (IK).

Selama tahun 2021 nilai capaian kinerja unit Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **106,38%** Nilai tersebut didapat melalui hasil penilaian pada aplikasi SIK-M. Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Capaian Kinerja (2020)	Capaian Kinerja (2021)	% Capaian Kinerja
Stakeholder perspective						
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar	USD 86,4 Miliar	USD 22,25 Miliar 	120%
		% Kontribusi PDB Pariwisata	3%	2,55%	2,26% 	87,67%
SS2	Terbangunnya destinasi pariwisata prioritas nasional	Jumlah tata Kelola Destinasi	5	5	4 	90%

SS3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih)	50.000	505.677	34.122 	84,12%
Costumer Perspective						
SS4	Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5	5	14 	120%
SS5	Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	4 Lokasi	6 Lokasi	4 Lokasi 	100%
SS6	Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif	Nilai Penanaman Modal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.17 Triliun	Rp 31,07 Triliun	Rp 33,405 Triliun 	120%
SS7	Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa yang difasilitasi mendaftarkan Kekayaan Intelektual	75 Produk/Jasa	1.250 Produk/Jasa	300  Produk/Jasa	120%
SS8	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik dan terlatih	50.000 Orang	505.677	34.122 	84,12%
Internal Business Perspective						
SS9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Efektif dan Efisien	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%	100%	100% 	120%
		Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan	50%	100%	100% 	120%

Learning and Growth Perspective						
SS10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Deputi yang sesuai Kompetensinya	75%	97%	100% 	120%
SS11	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Evaluasi SAKIP Deputi	65	64,51	67,42 	106,18%
		Nilai PMPRB Deputi	60	91,25	86,06 	120%
SS12	Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	65	88,7	94,60 	120%

Tabel 7. Capain Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Aplikasi SIK-M

Sementara itu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung oleh penganggaran yang memadai dan sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp 13.211.945.069 dengan nilai presentase 99,70%.

Selama 2021, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk efisiensi sumber daya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi secara *online*, tercatat dalam sehari bisa dilakukan hingga 15 Rapat koordinasi dengan K/L.
2. Pengaturan jadwal penggunaan akun zoom secara terpusat, sehingga total Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya memiliki tiga akun zoom yang dapat digunakan secara maksimal. Hal ini cukup menghemat anggaran jika dibandingkan dengan unit lain yang masing-masing unit eselon 2 memiliki 1 akun zoom.
3. Jumlah pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika dibandingkan dengan unit lain termasuk paling sedikit, namun dengan jumlah sedikit dapat menghasilkan output yang sama dengan unit lain.
4. Penyelenggaraan pelatihan/pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri, baik secara *online* maupun *offline*.

Unit	Pagu	Realisasi Pagu	%	Sisa Pagu	%
Sekretariat Deputi	3.050.622.000	3.044.775.860	99,81%	5.846.140	0,19%
Asdep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	1.861.350.000	1.826.977.059	99,78%	3.972.941	0,22%
Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.085.000.000	4.154.641.346	99,75%	10.390.654	0,25%
Asdep Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.485.000.000	1.456.460.826	99,93%	1.039.174	0,07%
Asdep Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.285.000.000	1.267.753.529	98,90%	14.146.471	0,1%
Asdep SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.485.000.000	1.461.336.449	99,68%	4.631.551	0,32%
Total	13.251.972.000	13.211.945.069	99,70%	40.026.931	0,3%

Tabel 8. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2021.

DAFTAR PUSTAKA

KemenPANRB. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi*. Jakarta.

KemenPANRB. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Kemenko Marves. 2020. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman*. Jakarta.

Kemenko Marves. 2017. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman*. Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. *Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024*. Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. *Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta.

Kemenparekraf. 2021. *Laporan Infografis Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per November 2021*. Jakarta.

BPS. 2021. *Laporan Tahunan Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Indonesia*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2021. *Laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Triwulan IV Tahun 2021*. Jakarta.

Kemendag. 2021. *Laporan Neraca Perdagangan Indonesia Triwulan IV Tahun 2021*. Jakarta.

Kemeninvest/BKPM. 2021. *Laporan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Triwulan IV Tahun 2021 berdasarkan Sektor Industri*. Jakarta.

Kemenaker dan BSN. 2021. *Nota Dinas Penyampaian Jumlah Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta.